



PULUHAN APS PARPOL, DITURUNKAN PAKSA OLEH BAWASLU

BACA HALAMAN 2-3



RAKER APEKSI REGIONAL
KALIMANTAN WADAH PENGUATAN
SINERGI DAN KOLABORASI

BACA HALAMAN 14



Sejumlah APS yang melanggar ketentuan kampanye ditertibkan oleh Bawaslu Bulungan.

Puluhan APS Parpol, Diturun Paksa Oleh Bawaslu

TANJUNG SELOR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bulungan melakukan penertiban alat peraga sosialiasi (APS), yang terpasang di sejumlah titik di Kabupaten Bulungan.

Penertiban APS tersebut secara serentak dilangsungkan pada 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten

Bulungan. Beragam jenis APS yang diturun paksakan oleh Bawaslu, yang berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Senin (9/10/2023).

Kepada wartawan Ketua Bawaslu Bulungan, Dwi Suprpto menyampaikan, penertiban APS dilakukan serentak di seluruh kabupaten dan kota di

Kalimantan Utara (Kaltara).

Dijelaskan Dwi, APS yang ditertibkan merupakan alat sosialisasi yang di pasang oleh partai politik ataupun perseorangan yang melanggar pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023.

“Beberapa ketentuan yang dilanggar, karena belum diperbolehkan melakukan sosialisasi yang mengandung unsur kampanye. Dengan mencantumkan nomor urut bakal calon legeslatif (Bacaleg), dan juga partai politik (Parpol),” ujarnya.

Penertiban, dilakukan khusus untuk baleho yang memuat unsur kampanye. Berupa citra diri dengan mencantumkan logo dan nomor urut parpol, maupun bacaleg. Termasuk ada kata ajakan untuk memilih, baik dalam bentuk kalimat, atau tanda gambar coblos.

Penindakan yang dilakukan secara serentak oleh Bawaslu, sambung dia sebelumnya telah dikeluarkan edaran dan rapat koordinasi dengan melibatkan parpol dan intas OPD terkait.

Selain telah mensosialisasikan, Bawaslu juga sudah bersurat kepada Parpol, agar melepas baliho yang mengandung unsur kampanye, secara mandiri.

Proses penertiban, berjalan lancar. Petugas menyisir baliho di bahu jalan, jalan poros utama, termasuk jalan lorong rumah warga. Barang bukti APS yang kita turunkan, langsung diamankan oleh Bawaslu Bulungan. **(tin/and)**

Editor: Andhika





Wakil Ketua II DPRD Berau, Ahmad Rifai.

Rifai: Segera Tangani Krisis Air Bersih!

TANJUNGREDEB – Krisis air bersih yang masih terjadi di beberapa kampung disorot Wakil Ketua II DPRD Berau, Ahmad Rifai. Diharapkannya ada solusi mengenai hal tersebut.

Menurutnya, agar krisis air bersih di beberapakampung bisateratasi, pemerintah harus memprioritaskan penambahan sambungan air bersih. “Saya banyak mendapat masukan mengenai air bersih. Seharusnya ini bisa menjadi perhatian bersama,” katanya.

Dia menilai, dengan anggaran Berau di tahun ini yang cukup besar seharusnya mampu mengakomodir kampung yang belum teraliri air bersih. “Saya rasa bisa dianggarkan untuk keterse-

diaan air bersih,” ucapnya.

Dirinya mencontohkan, untuk di Kampung Tubaan bisa menarik air dari Kampung Berantai. Di mana kontur tanah lebih tinggi, dan debit air cukup besar, sehingga bisa dimanfaatkan.

“Maka dari itu dengan produksi debit air yang lebih di daerah Berantai bisa menjadi solusi untuk mengaliri kampung lainnya,” jelasnya.

Diterangkannya, meski debit air di Kampung Berantai cukup, namun permasalahannya adalah belum adanya anggaran yang diposkan ke area tersebut. Sehingga untuk pengadaan belum bisa terlaksana.

“Yang terpenting saat ini bagaimana kebutuhan warga sekitar bisa terpenuhi. Jadi OPD diharapkan bisa cari solusi secepatnya,” tuturnya.

Ahmad Rifai berharap pemerintah bisa memberikan solusi cepat dan tepat, guna masalah air bersih tersebut. Tentunya, kebutuhan air bersih tidak hanya dikeluhkan oleh masyarakat pesisir, namun untuk Segah dan Kelay. Begitu juga Maratua dan Derawan, pasti sangat butuh air bersih untuk keberlangsungan hidup. “Pendataan perlu dilakukan. Kampung mana saja yang membutuhkan, jika dekat dengan debit air bisa saja dianggarkan secepatnya,” tutupnya. (adv/and)

Elita Dorong Peran Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan Kampung

TANJUNGREDEB – Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina menginginkan adanya keterlibatan perempuan dalam pesta demokrasi tingkat kampung pada akhir oktober mendatang.

Ia mengaku sangat berharap ada perempuan dalam menduduki tata kelola pemerintahan tingkat kampung. “Sejauh ini sangat jarang ada perempuan yang mau maju sebagai kepala kampung,” ungkapnya.

Menurutnya, mengenai hal tersebut harus ada sosialisasi yang mendalam oleh para petugas kampung.

Dirinya menambahkan terkait Pilkacam, petugas harus tegas dan jujur serta menjalankannya sesuai dengan Perda yang berlaku. “Jangan ada money politik dalam pemilihan nanti. Teruntuk masyarakat, harus bijak dalam memilih pemimpin,” tegasnya.

Politikus Golkar ini berharap pemilihan kepala kampung nanti dapat berjalan kondusif dan melahirkan pemimpin yang baik. “Saya harap pemimpin yang terpilih dapat mengemban amanah dengan baik dan memberikan kontribusi yang maksimal kepada masyarakatnya nanti,” tandasnya. (adv/and)



Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina

Peri Tegaskan Jangan Ada Perbedaan dalam Pelayanan Kesehatan

TANJUNG REDEB – Banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan turut disoroti Ketua Komisi I DPRD Berau, Feri Kombong. Diakuinya hal tersebut sering diterima dirinya.

Mengenai persoalan itu, Feri menegaskan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk dapat memaksimalkan pelayanan. Baik itu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Rivai maupun Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang ada di Bumi Batiwakkal.

“Jadi memang dari masyarakat, sering saya terima mengenai keluhan pelayanan kesehatan yang kurang baik ini,” ungkapnya.

Dia menilai, pelayanan sangat maksimal merupakan suatu keharusan yang diberikan kepada masyarakat. Baik itu menggunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atau secara mandiri.

“Tidak boleh tebang pilih. Semua masyarakat harus dilayani dengan baik, bagaimanapun kondisi ekonominya. Seluruhnya harus diperlakukan sama yakni mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal,” tegasnya.

Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu meminta kepada



Ketua Komisi I DPRD Berau, Feri Kombong

OPD terkait untuk terus melakukan pengawasan terhadap tenaga kesehatan yang bertugas di beberapa kampung dan kecamatan yang jauh dari pusat perkotaan Tanjung Redeb.

“Bukan tanpa alasan, keluhan soal pelayanan kesehatan ini bukan hanya di perkotaan saja, melainkan juga sering terjadi di perkampungan,”

bebernyanya.

Feri menegaskan, jangan sampai ada petugas kesehatan yang menerapkan tidak melayani pasien di luar jam kerja. Sehingga, pelayanan menjadi tidak maksimal. “Kami tidak ingin ada mendengar informasi seperti itu, karena pelayanan kesehatan 24 jam. Kapanpun ada pasien yang datang harus dilayani, karena memang itu konsekuensinya,” katanya.

Dia yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC Gerindra Berau itu mengingatkan agar pelayanan kesehatan tidak pilih kasih. “Saya minta pasien pengguna BPJS atau mandiri itu pelayanannya sama. Jangan dibedakan,” imbuhnya.

Kendati demikian, terkait hal ini dirinya meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk memberi ketegasan kepada OPD terkait mengenai pemberian pelayanan kesehatan. Sehingga, kata dia, apa yang dikeluhkan masyarakat dapat teratasi.

“Tugas kita sebagai pelayan masyarakat. Kalau ada keluhan, artinya kita harus mengevaluasi kinerja. Saya tegaskan jangan sampai ada lagi keluhan dari masyarakat soal bidang kesehatan,” tandasnya. (adv/and)

Tingkatkan Kualitas Beras Lokal, Nurung Minta OPD Terkait Buat Inovasi

TANJUNGREDEB – Kampung Buyung-Buyung, Kecamatan Tabalar terkenal dengan produksi berasnya. Maka dari itu, Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung mendorong para petani agar meningkatkan kualitas beras yang diproduksi.

Dia mengatakan, kualitas beras lokal jika dibandingkan dengan beras luar memang masih dibawah. “Beras lokal kita juga tidak tahan lama. Agar banyak yang membeli, saya minta agar kualitasnya lebih ditingkatkan lagi,” tuturnya.

Terkait peningkatan kualitas, Nurung meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membuat inovasi yang bertujuan agar kualitas beras lokal setara dengan beras luar, sehingga memiliki daya saing. “Kami dari DPRD sangat mendorong sinergitas antara petani dengan pemerintah yang tentunya berdampak baik kepada perekonomian mereka,” ujarnya.

Politikus Nasional Demokrat (NasDem) ini mengharapkan adanya bantuan pemasaran beras lokal asal Kampung Buyung-Buyung itu. Disebutkannya agar petani tidak bingung menjual hasil produksi berasnya dan dapat laku di pasaran.

“Jadi ini perlu diperhatikan, selain petani sejahtera juga kita mencapai ketersediaan pangan. Untuk OPD terkait, saya harap bisa memberi pembinaan yang baik lagi kepada petani kita,” pungkasnya. (adv/and)



Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung

Kasus HIV di Berau Meningkatkan, Begini Tanggapan Syarifatul

TANJUNGREDEB – Meningkatnya kasus HIV di Bumi Batiwakkal mendapat sorotan Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah. Ia mengungkapkan, dengan meningkatnya angka kasus HIV di Berau, seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Diketahui, pada tahun 2022 lalu ada 36 penderita HIV. Angka tersebut sama dengan semester pertama pada tahun 2023 ini.

“Jadi angka itu kan menunjukkan peningkatan. Kalau 2022 kemarin selama satu tahun ada 36 kasus, sedangkan 2023 ini baru enam bulan sudah 36 juga,” ungkapnya.

Menurutnya, agar angka penderita HIV di Berau tidak bertambah, pemerintah harus gerak cepat mencari solusi dan membuat program yang tepat. “Ini tanggungjawab kita semua dan harus secepatnya ada langkah untuk mengentaskan kasus tersebut,” tuturnya.

Dirinya mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk bersinergi mencegah penyakit HIV. “Mungkin untuk langkah awal menggelar razia rutin ke THM atau ke tempat-tempat lainnya yang rawan menyebarkan HIV,” katanya.

Politikus Golkar ini membeberkan bahwa rerata yang terjangkit HIV berasal dari luar Berau. “Mungkin lebih baik dikembalikan ke daerah asalnya, jangan sampai menyebarkan di Berau, di Karantina terlebih dahulu,” ucapnya.

Syarifatul berharap, masyarakat lebih berhati-hati dalam pergaulan, jangan sampai sembarangan berhubungan dengan orang yang tidak dikenal, selain itu yang dikhawatirkan bisa menularkan kepada orang terdekat seperti pasangan sendiri.

“Hal ini perlu perhatian serius. Apalagi sudah melebihi angka di tahun 2022, saya minta OPD terkait sering-sering melakukan razia tes acak HIV,” tandasnya. (adv/and)



Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah



Peserta Balap motor saat menerima hadiah.

Kejurnas Balap Motor, Rebut Hadiah Ratusan Juta Rupiah

TANJUNGSALOR - Pemerintah Kabupaten Bulungan, menggagas Kejurnas Nasional (Kejurnas) Balap Motor putaran ke-3 dan Kejurnas Provinsi (Kejurprov) ke-2 Kaltara, pada Jumat dan Sabtu 7-8 Oktober 2023, bertempat di Sirkuit Bumi Rahayu, Kecamatan Tanjung Selor.

Ketua Koordinator Wilayah (Korwil), Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kaltara, Sulis Krisbowo, saat dikonfirmasi menjelaskan pelaksanaan Kejurnas dan Kejurprov merebutkan hadiah senilai Rp 125 juta. "Kejurnas dan Kejurprov diikutsertakan oleh pembalap dari bermacam kelas," jelasnya.

Kelas Kejurnas motor Bebek 4T 150cc expert, motor bebek 4T 150cc novice, motor bebek 4T 150 cc rookie dan motor bebek 4T 150 cc beginner.

Sedangkan, untuk kelas tambahan

motor bebek 4 tak tune up 150 cc, expert mix open. Motor bebek 4 tak 150 cc novice mix open, motor bebek standar dan pemula. Kemudian, motor Bebek standar 2 tak, 116 cc lokal Kaltara dan Berau.

Matic Standar 131cc, dan pemula, Matic Standar 131cc lokal Kaltara dan Berau. "Pada hari Sabtu kemarin Kualifikasi diambil waktu tercepat per kelas, dengan menggunakan alat digital sensor transponder dari Pengurus IMI pusat, untuk kemudian menentukan grid start saat final di hari minggu," tuturnya.

Adapun, untuk peserta yang dilibatkan dalam Kejurnas dan Kejurprov mencapai puluhan orang. "Kegiatan ini sifatnya seri, sesuai dengan even serupa selanjutnya akan dilakukan di region pulau Kalimantan secara bergantian," tuturnya.

Dia katakan, poin positif yang diambil dari perlombaan ini, dapat meningkatkan kemampuan putra daerah, dalam ajang Nasional. "Melalui kegiatan ini merupakan ajang pembinaan dan penguatan kemampuan putra daerah. Dengan adanya kegiatan ini akan melatih pembalap sehingga lebih giat berlatih dalam hal teknis, cara balap serta keberanian serta saling berbagi pengetahuan mekanik lokal dengan tim besar tingkat Provinsi dan lainnya," terangnya.

Adapun, usiapesertayangikutdalam even ini, termuda dari usia 10 tahun dan peserta tertua berusia 32 tahun. Pada pelaksanaan turnamen dapat berjalan aman dan lancar. (tin/and)

Editor: Andhika



Dipengaruhi iklim, masyarakat waspada terhadap suhu panas di Indonesia.

Perubahan Iklim Kenaikan Suhu Panas Tidak Terjadi di Kaltara

TANJUNG SELOR – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), memprediksi adanya kenaikan suhu panas di wilayah Indonesia, sepanjang Oktober tahun ini. Suhu panas di wilayah Indonesia diprediksi tembus 40 derajat celsius. Palsanya, hal tersebut imbas dari adanya perubahan iklim.

Kepada wartawan, Kepala Stasiun Meteorologi Juwata Tarakan, Muhammad Sulam Khilmi menjelaskan, untuk wilayah Kaltara tidak mengalami peningkatan suhu panas.

“Berdasarkan pantauan kami, saat ini masih terpantau normal. Sekarang suhu panas di wilayah Kaltara tercatat 32 derajat celsius,” ujarnya.

Saat ini, secara global, nilai indeks osilasi selatan (SOI), indian ocean dipole (IOD) dan Nino 3.4 tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, terhadap peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia.

Sementara itu, madden julian oscillation (MJO), aktif pada kuadran 6

western pacific, dalam kondisi netral. Yang menunjukkan kondisi yang tidak signifikan hingga sepekan kedepan. Selanjutnya, aktivitas gelombang atmosfer rossby ekuator terpantau aktif di wilayah Aceh, Sumatra Utara dan Riau dalam sepekan kedepan.

“Faktor tersebut mendukung potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut. Kemudian, sirkulasi siklonik terpantau berada di Samudra Pasifik utara Papua yang membentuk daerah pertemuan atau perlambatan kecepatan angin (konvergensi) di Samudra Pasifik Utara Papua,” jelasnya.

Sedangkan, daerah pertemuan atau perlambatan konvergensi lainnya, terpantau memanjang dari perairan sebelah barat Aceh hingga Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dari Kalimantan Timur bagian selatan, Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Kalimantan Utara bagian Utara, Sulawesi Tengah bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Maluku Utara, dari Papua bagian ten-

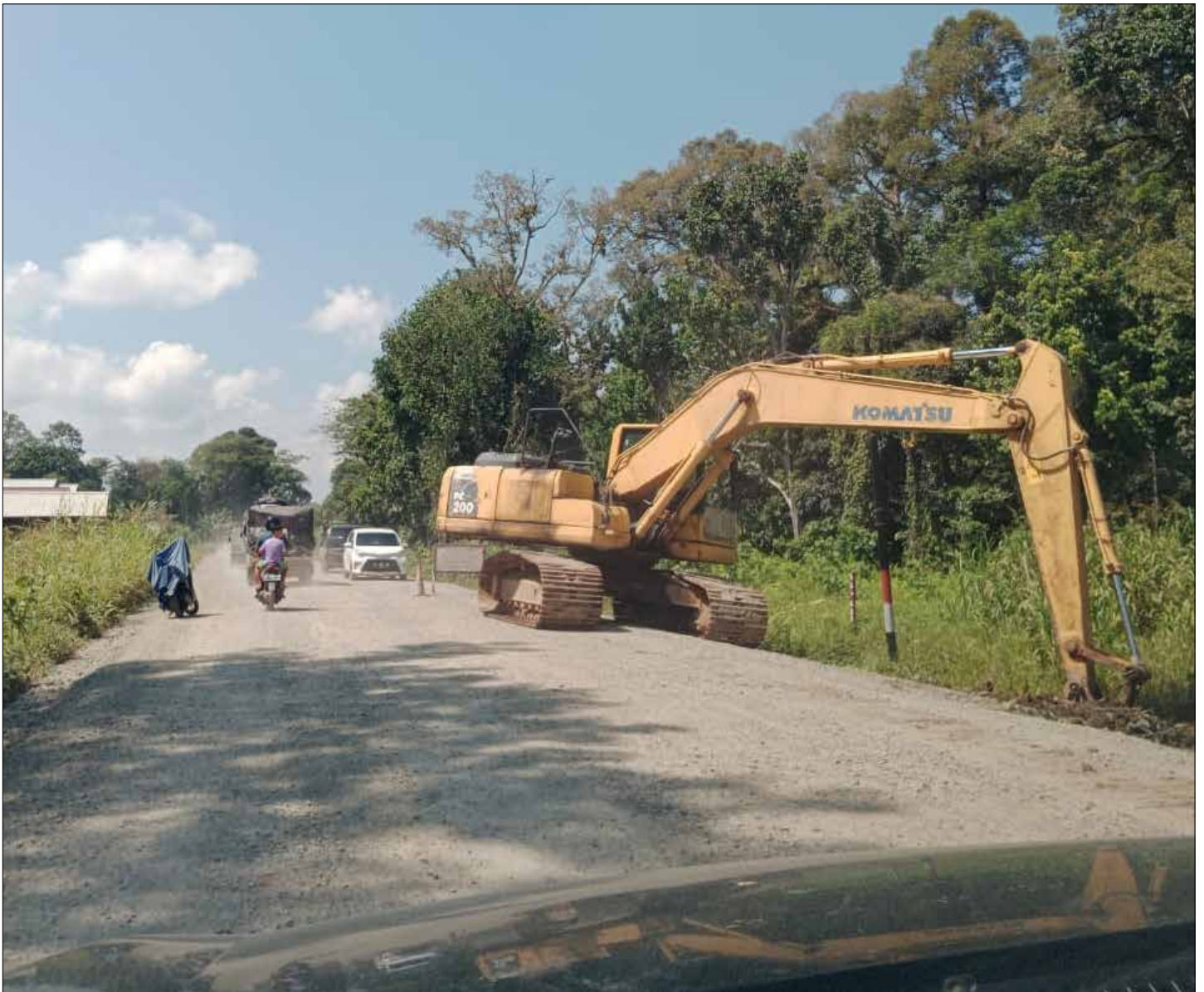
gah hingga Papua Barat.

Kondisi tersebut, kata dia mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Berdasarkan prediksi kondisi global, regional dan probabilitas model diperkirakan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terpantau di sejumlah wilayah.

Seperti terjadi di Aceh, Sumatra Utara, Riau, Sumatra Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Papua.

Faktor cuaca global dan regional di sebagian besar wilayah Indonesia, hal ini mempengaruhi cuaca di wilayah Indonesia dalam sepekan kedepan. “Untuk sepekan kedepan, sebagian wilayah Aceh, Sumatra Utara, Riau, Sumatra Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Papua,” tandasnya. (tin/and)

Editor: Andhika



Proyek fisik jalan Bulu Perindu lanjut dikerjakan tahun ini.

Optimistis Pengerjaan Fisik Rampung Sebelum Akhir Tahun

TANJUNG SELOR - Pemkab Bulungan mendorong realisasi fisik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dioptimalkan dengan sisa waktu yang ada.

Kepada wartawan, Bupati Bulungan, Syarwani menjelaskan, beberapa proyek infrastruktur terus dijenjot oleh pemerintah. Semuanya tengah berprogees pengerjaan itu ditargetkan rampung sebelum akhir tahun 2023. "Meskipun, saat ini masih ada beberapa kegiatan fisik yang belum rampung," ungkapnya, belum lama ini.

Salah satunya, berkaitan dengan proyek pekerjaan lanjutan pengaspalan Jalan Buluh Perindu. Untuk

itu, pemerintah mendorong kepada perangkat daerah bisa memaksimalkan sisa waktu yang ada.

"Dengan sisa waktu yang ada, saya berharap target realisasi fisik dan keuangan dapat terealisasi hingga akhir tahun," jelasnya.

Hal itu dilakukan guna mendalami kendala yang dihadapi seluruh organisasi perangkat daerah. Apalagi, saat ini ada beberapa kegiatan fisik yang memakan waktu panjang. Meskipun, saat ini belum ada pengerjaan proyek besar yang ada itu sifatnya parsial.

Sebelumnya, Sekertaris Daerah (Sekda) Bulungan, Risdianto menambahkan, Pemda Bulungan su-

dah melakukan rapat koordinasi (rakor) percepatan pembangunan serta membahas komitmen dan konsolidasi bagi seluruh kepada perangkat daerah.

Rujukannya, hasil ringkasan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Ketika berbicara dari aspek perencanaan dan pelaksanaan pelaporan pertanggung jawaban. Banyak hal yang akan dibedah.

"Mulai dari standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," pungkasnya. **(tin/and)**

Editor: Andhika



Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Bima Arya Sugiarto.

ADE/MKR

Penurunan Stunting jadi Fokus Raker APEKSI Regional Kalimantan

TARAKAN - Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan resmi dibuka oleh Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Bima Arya Sugiarto di Hotel Tarakan Plaza pada Senin, (9/10/2023). Dalam rapat kerja ini, salah satu fokus pembahasan adalah sinergitas penurunan stunting.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Bima Arya Sugiarto mengatakan, salah satu alasan mengapa stunting perlu untuk diatasi karena Indonesia sedang menyiapkan generasi emas di tahun 2045. Menurutnya, generasi emas atau generasi muda yang disiapkan untuk memimpin bangsa di 2045 harus memiliki mental dan jiwa yang sehat.

"Rakor komwil kali ini bahasannya sangat strategis biasanya berbicara soal kebijakan terkait politik pemerintahan, tapi kini kita berbicara yang sangat penting untuk 2045 yaitu stunting," kata Bima Arya, usai membuka Rakor Komwil V APEKSI Regional Kalimantan di Tarakan Plaza, Kota Tarakan, pada Senin, (9/10/2023) pagi.

Bima Arya menjelaskan, generasi muda atau generasi alpha yang saat ini akan tumbuh untuk memimpin bangsa di 2045 harus lepas dari permasalahan stunting.

"Tidak mungkin kita bisa meraih 2045 tanpa mengatasi masalah stunting dalam menyiapkan anak-anak muda. Gen alpha hari ini harus kita pastikan sehat jiwa dan raga, fisik dan dan stamina untuk memimpin kita di 2045," sambungnya.

Lebih lanjut Bima Arya menuturkan, permasalahan stunting ini tidak bisa ditangani sendirian oleh pemerintah kota, untuk itu sangat dibutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak.

"Disini (Rakor Komwil) akan dibahas bagaimana para walikota bersama-sama forkopimda bisa berkolaborasi, bersinergi dengan fokus kepada perapihan data membangun kolaborasi mencari anggaran dana karena tidak semua dari APBD, dan juga menggunakan berbagai perangkat teknologi agar langkah-langkah ini semakin terukur," kata Bima Arya.

Disamping pembahasan Rakor Komwil VAPEKSI Regional Kaliman-

tan, Bima Arya pun mengungkapkan apresiasi terhadap pemerintah Kota Tarakan yang telah menjadi tuan rumah yang baik.

"Saya ucapkan terima kasih kepada pak walikota tarakan telah menjadi tuan rumah dan secara teknis seremoni rapih dan inspiratif serta secara substansi juga baik sekali," ucapnya.

Dalam kesempatan ini pula, Bima Arya menyebut bahwa Kalimantan akan menjadi pusat peradaban di masa mendatang. Menurutnya hal itu bisa terjadi asalkan dua hal ini perlu dipersiapkan. Yang pertama, infrastruktur dan kedua Sumber Daya Manusia.

"Saya yakin Kalimantan akan menjadi pusat peradaban di masa mendatang, yang terpenting infrastruktur harus memadai. Masa mau jalan jalan ke kota di Kalimantan kita harus ke Jakarta dulu. Yang kedua, kita harus persiapkan SDM nya," pungkasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya

Editor: Andhika



ADE/MKR

Wali Kota Tarakan, Khairul

Tarakan Bakal Dapat Dana Intensif Daerah Usai Berhasil Kendalikan Inflasi

TARAKAN - Pemerintah Kota Tarakan bakal mendapatkan Dana Intensif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat usai berhasil mengendalikan inflasi. Hal itu disampaikan Wali Kota Tarakan, Khairul yang juga Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) saat ditemui di Tarakan belum lama ini. Namun Khairul tak merinci lebih detail berapa jumlah besaran uang yang akan diterima.

“Sepertinya lebih dari Rp 1 miliar, karena kita inflasi tahun lalu hampir dua kali kalau tidak salah dapat sekitar Rp 28 miliar,” ucap Khairul.

Khairul mengatakan, selain TPID, ada dua penghargaan lainnya yang diterima Tarakan, juga akan mendapat Dana Intensif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat. Adapun dua penghargaan lainnya yakni Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) kota terbaik dan Festival Iraw Tengkyu yang masuk dalam top 45 event Nasional di Ke-

menterian Pariwisata.

“TP2DD dan termasuk 45 top event inovasi, soalnya disampaikan Menteri Keuangan, Wakil Presiden dan Gubernur Bank Indonesia bahwa daerah-daerah yang berprestasi akan diberi intensif tambahan,” ungkapnya.

Namun Khairul belum mengetahui secara pasti kapan dana intensif itu akan cair. Kendati demikian, Khairul memastikan uang tersebut akan digunakan untuk pembangunan Tarakan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Diberitakan sebelumnya, Tim TPID Kota Tarakan yang diketuai oleh Wali Kota Tarakan dinobatkan sebagai TPID Kabupaten/Kota terbaik Nasional tahun 2022 bersama kota Palembang, Banyuwangi, Bone dan Kupang. TPID Tarakan juga memperoleh predikat kinerja terbaik di Kalimantan. Sepanjang 2022 lalu, inflasi di Tarakan terkendali di angka 3,93 persen years-on-years (YoY), angka

ini merupakan hal yang positif mengingat pemerintah pusat dan daerah tengah berupaya mengendalikan inflasi pada taraf serendah mungkin sambil tetap menjaga pertumbuhan ekonomi terus tumbuh positif. Angka inflasi Tarakan pun terkendali di bawah rata-rata nasional yang berada di angka 5,52 persen YoY.

Selain pengendalian inflasi, Tarakan juga meraih penghargaan sebagai kota terbaik dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Dimana Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah terus mengalami peningkatan dari sebelumnya di 2022 lalu di angka 93 persen, kembali mengalami peningkatan menjadi 97,5 persen berkat implementasi transaksi non tunai yang semakin diperluas di lingkup Pemkot Tarakan. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya
Editor: Andhika



ADE/MKR

Momen Pelarungan Padaw Tuju Dulung ke laut Amal.

Mengenal Pelarungan Padaw Tuju Dulung, Ritual Syukur Asli Suku Tidung

TARAKAN - Malam Hiburan Rakyat menjadi penutup seluruh rangkaian Festival Iraw Tenggayu XII Tarakan. Festival Iraw Tenggayu XII sendiri telah berlangsung mulai 1 hingga 8 Oktober 2023.

Namun dari sekian banyak rangkaian yang telah dilaksanakan, salah satu momen yang banyak ditunggu masyarakat, yakni Pelarungan Padaw Tuju Dulung ke laut lepas. Prosesi adat ini digelar di kawasan wisata Ratu Intan Pantai Amal berlangsung semarak, pada Minggu, (8/10/2023) sore.

Pelarungan Padaw Tuju Dulung disaksikan langsung oleh ribuan masyarakat yang hadir. Pelarungan Padaw Tuju Dulung merupakan ritual syukur yang dilakukan suku Tidung Pesisir di Kalimantan Utara (Kaltara).

Tradisi tahunan ini selalu menyedot perhatian dan kini jadi salah satu event wisata menarik di Kaltara. Pad-

aw Tuju Dulung merupakan perahu khas suku Tidung Pesisir. Di atas perahu terdapat bagian yang menyerupai rumah yang disebut juga dengan meligay digunakan untuk meletakkan sesaji yang akan disuguhkan.

Prosesi Padaw Tuju Dulung adalah budaya Suku Tidung Pesisir atau Ulun Pagun, penduduk asli Tarakan. Ini merupakan kebiasaan tahunan menghaturkan sesaji ke laut sebagai ungkapan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa atas hasil yang diperoleh dari laut.

Wali Kota Tarakan, Khairul mengungkapkan, prosesi Pelarungan Padaw Tuju Dulung memiliki makna rasa mensyukuri sekaligus melanjutkan warisan budaya leluhur masyarakat Tidung khususnya di Tarakan.

"Pelarungan Padaw Tuju Dulung ini sebagai simbolisasi rasa syukur dan bagian tidak terpisahkan dari

upaya melanjutkan warisan pendahulu dan menjadikan pesta rakyat sebagai ajang mengenalkan khazanah budaya dan daya tarik wisata di Tarakan," ucap Khairul.

Dia mengatakan, bahwa Pelarungan Padaw Tuju Dulung pada Festival Iraw Tenggayu XII merupakan salah satu cara melestarikan budaya lokal.

"Melestarikan Budaya Kamu, Budaya Saya dan Budaya Kita Bersama Melalui Smart City," kata Khairul.

Selain itu, upaya meningkatkan pemanfaatan dan promosi pariwisata dalam upaya peningkatan perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakat serta menjadikan festival Iraw menarik wisatawan nusantara dan mancanegara. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya

Editor: Andhika



ADE/MKR

Para penari saat mempertunjukkan Tari Kolosal di penutupan Festival Iraw Tengkeyu XII.

Ratusan Penari Kolosal Ramaikan Acara Puncak Pelarungan Padaw Tuju Dulung di Tarakan

TARAKAN - 150 penari kolosal yang berasal dari gabungan dari siswa dan siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) se-Kota Tarakan turut meramaikan acara Puncak Pelarungan Padaw Tuju Dulung, yang dilaksanakan di Kawasan Wisata Ratu Intan Pantai Amal, Minggu (8/10/2023). Untuk diketahui, Pelarungan Padaw Tuju Dulung merupakan puncak dari pelaksanaan Festival Iraw Tengkeyu XII tahun 2023.

Tokoh Budaya Suku Tidung Kota Tarakan, Datu Norbeck mengungkapkan Setiap bagian tarian memiliki makna tersendiri. Dijelaskannya, pada bagian pertama dinamakan betetuyang yang berarti berayun-ayunan. Lalu kedua dinamakan tulut bebulu dengan arti terbang burung dan terakhir kadan diu yang berasal dari kata tekadan men-diu berarti kedatangan mandi.

"Ada legenda tentang putri kayan-

gan yang kedatangan mandi oleh seorang pria yang merupakan manusia biasa. Lagu itu (pada bagian ketiga) sangat terkenal dan lagunya bagus, enak dinyanyikan, banyak orang suka jadi kita jadikan tarian, aspek seni mutlak," katanya.

Selain diisi oleh para penari yang berasal gabungan dari siswa dan siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) se-Kota Tarakan, para penari ini juga dimotori oleh penari dari Sanggar Budaya Tradisi (SBT) Paguntaka sebanyak 44 orang. Kata dia, proses latihan dilakukan selama kurang lebih dua bulan lamanya. Jika di total, jumlah latihan yang dilakukan para penari sebanyak 60 kali.

"Musik pengiring tari juga dari SBT Paguntaka. Prosesnya 60 kali latihan, jadi satu hari satu kali," ujar Datu Norbeck saat ditemui di Wisata Ratu Intan Pantai Amal, Minggu (8/10/2023).

Dia mengatakan, latihan yang cukup lama tersebut dilakukan guna menghasilkan tarian yang maksimal. Dalam tarian kolosal ini, lanjut Datu, ada tiga varian tarian. Pada tarian pertama bersumber dari kesenian melayu Tidung, kedua dari kesenian Jepin dan ketiga berasal dari lagu yang biasa dimainkan dengan musik kelintangan. "Ada tiga bagian jadi ada tiga karakter tarian," paparnya.

Dia lanjut menjelaskan bahwa terdapat 106 orang penari yang menggunakan warna merah, kedua 30 orang dengan busana berwarna hijau serta 12 orang penari lainnya yang menggunakan baju berwarna kuning.

"Warna busananya juga dominan tiga warna itu (Warna khas Suku Tidung), merah, hijau, kuning," jelasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya
Editor: Andhika



ADE/MKR

Rapat Kerja APEKSI Regional Kalimantan yang digelar di Hotel Tarakan Plaza.

Raker Apeksi Regional Kalimantan jadi Wadah Penguatan Sinergi dan Kolaborasi

TARAKAN - Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan yang digelar di Kota Tarakan secara resmi dibuka. Rapat kerja tersebut dibuka langsung oleh Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Bima Arya Sugiarto di Hotel Tarakan Plaza pada Senin, (9/10/2023).

Wali Kota Tarakan, Khairul menjelaskan, pertemuan para Wali Kota se-Kalimantan ini, merupakan wadah penguatan sinergi dan kolaborasi dalam rangka memperjuangkan aspirasi pemerintah dan masyarakat perkotaan. Melalui rapat kerja ini, dia berharap dapat bermanfaat kepada seluruh daerah di Kalimantan.

“Salam takzim kami dari masyarakat Tarakan bagi Bapak dan Ibu sekalian dari kota-kota di Kalimantan. Saya berharap, yakin, dan percaya APEKSI bisa memberikan manfaat yang banyak untuk masyarakat,” ucap Khairul dalam sambutannya.

Diamengatakan, Tarakan memiliki luas wilayah yang cukup kecil hanya sekitar 250,8 km. Hanya saja, wilayah yang kecil tersebut berbanding terbalik dengan jumlah penduduk Tarakan yang sangat banyak mencapai 300 ribu. “Jadi kalau kita liyat luas wilayah Tarakan ini hanya 0,33 persen dari luar wilayah Kaltara, tidak sampai satu persen. Tapi penduduknya itu hampir 40 persen tinggal di Tarakan,” ungkapnya.

Dengan jumlah penduduk yang cukup besar tersebut, Khairul tak menampik menjadi tantangan tersendiri dalam mengembangkan Kota Tarakan. Namun dia menilai hal itu tidak menjadi masalah berarti karena pembangunan di Tarakan terbilang berhasil. Salah satu bukti nyata, kata dia, penurunan angka stunting di Kota Tarakan.

Dikatakannya, Tarakan merupakan kota yang telah menurunkan angka stunting dari 25,9 persen menjadi

15,4 persen pada 2022 lalu. Menurutnya, penurunan angka stunting ini bisa berhasil ditangani pemerintah kota berkat kolaborasi dari seluruh pihak.

Untuk diketahui, rapat kerja ini akan membahas tema utama “Sinergisitas Stakeholder Penurunan Stunting”. Selanjutnya juga dibahas berbagai rekomendasi dari kota-kota se-Kalimantan yang akan dibawa menjadi rekomendasi APEKSI Pusat bagi Pemerintah. Dalam rapat kerja ini, Tarakan dipilih menjadi tuan rumah APEKSI regional Kalimantan dan dihadiri sembilan anggota kepala daerah. Adapun sembilan anggota dalam APEKSI regional Kalimantan adalah Banjarmasin, Balikpapan, Palangka Raya, Pontianak, Banjarbaru, Singkawang, Bontang, Samarinda dan Tarakan. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya
Editor: Andhika

Koran DIGITAL

SELASA, 10 OKTOBER 2023



PASANG IKLAN HUBUNGI
0811 5405 033

Lebih Dekat dengan Satu Klik

BONUS BERKURANG, PELATIH OGAH TANDA TANGAN

BACA HALAMAN 2-3



**SEMPAT LARI KE MAMUJU,
ART ANIAYA BALITA
9 BULAN DI BALIKPAPAN
DITANGKAP POLISI
BACA HALAMAN 31**



SYAKURAH/RADARBONTANG

Suasana penandatanganan bonus Porprov Atlet, manager, pelatih dan official.

Bonus Porprov Berkurang, Pelatih Ogah Tanda Tangan

BONTANG - Atlet, manager, pelatih dan official menerima surat untuk pengambilan pengatgaan serta bonus dari Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII 2022 lalu. Pengambilan bonus tersebut dilakukan di Aula Dispopar, Senin (9/10/23).

Para pelatih manager serta official enggan menandatangani administrasi pencairan bonus Porprov VII 2022 dikarenakan besaran yang diberikan dinilai tidak sesuai dengan perjanjian awal.

Salah satu tanggapan pelatih Pelatih Cabor Judo Sulis Subiarti mengaku kecewa dengan keputusan tersebut. Karena sebelumnya

pemerintah menjanjikan bonus yang diterima setidaknya akan bernominal sama seperti tahun lalu.

"Pemerintah sempat menyampaikan saat penyerahan bonus secara simbolis bahwa setidaknya nominal yang kami terima akan sama dengan tahun lalu. Tapi pas datang ke sini kita lihat beda, kami akan ajukan ke Wali Kota beserta DPRD nanti," jelasnya

Pada Porprov sebelumnya, besaran penghargaan dan bonus didapat dengan mengalikan jumlah medali yang didapat. Namun kini hanya dihitung dengan medali tertinggi yang didapat.

Adapun penghargaan yang didapat Cabor Judo Bontang yakni, empat medali emas, dua medali perak, dan 18 medali perunggu.

Pelatih Panjat Tebing, Yumnaini juga merasa kecewa dengan keputusan tersebut karena persiapan Porprov kemarin cukup memakan waktu yang lama dan uang akomodasi yang banyak ditombok.

"Uang akomodasi ditanggung pemerintah hanya 40 persen, yang berarti hanya 8 dari 16 personil yang tercover," jelasnya.

Penulis: Syakurah

Editor: Nicha Ratnasari



Pelatih dan Official Tolak Tanda Tangan Bonus Porprov, Ini Tanggapan Dispopar Bontang

BONTANG - Ketidaksiesuaian bonus bagi cabang olahraga (cabor) yang meraih medali dalam Porprov VII di Kabupaten Berau pada tahun 2022 lalu, membuat para pelatih, manager serta official menolak untuk menandatangani pencairan bonus.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang, Aznem menilai jika satu cabor hanya dihitung satu pelatih. Sehingga perhitungan mereka dirasa sudah pas.

"Saya tidak tahu kalau satu cabor pelatih bisa sampai tiga, dan manager sama official juga ada bonus sendiri," jelasnya Senin (9/10/23).

Ia menjelaskan, bahwa walaupun pelatih, manager dan official menolak untuk tanda tangan, hal tersebut tidak mempengaruhi pencairan bonus yang nantinya akan dikirim ke BPKAD.

"Kami akan kita ke BPKAD, walaupun ada yang tidak ditanda tangan tidak apa, karena mereka sudah memberikan nomor rekening jadi ya tetap kami transfer. Kalau tidak diterima kami akan tetap kembalikan ke

kas daerah," jelasnya.

Adapun sistem perhitungan bonus pada tahun 2018 untuk manager hingga official, dikalkulasikan berdasarkan total perolehan medali memang diterapkan saat Porprov Kaltim di Kutim. Namun, kini Dispopar mengganti sistem tersebut kini tidak diterapkan lantaran mendapatkan protes dari para atlet.

"Kemarin atlet komplain, kenapa lebih banyak bonus untuk manager dari atlet. Karena kalkulasinya, misalkan satu atlet dapat emas satu dan dalam cabornya memperoleh 10 emas, kalau dikalkulasi lebih banyak untuk manager," jelasnya.

Kepala Bidang Olahraga, Muhtar menambahkan untuk bonus atlet pada anggaran murni 2023 senilai Rp 5 miliar. Jumlah tersebut termasuk untuk kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) sehingga tersisa Rp 4 miliar.

"Pada APBD perubahan 2023 Dispopar hanya mendapatkan tambahan Rp 6 miliar untuk bonus atlet.

Jadi total Rp 10,5 miliar," ungkapnya.

Adapun jumlah yang diberikan seperti berikut. Untuk yang mendapatkan medali emas perorangan Rp 50 juta, Perak Rp 25 juta dan Perunggu Rp 15 juta. Untuk grup 2 sampai 5 orang medali emas mendapat Rp 75,3 juta, perak Rp. 50 juta, perunggu Rp 22,5 juta.

Kemudian untuk grup 6 sampai 10 orang, medali emas mendapatkan Rp 112,5 juta, perunggu Rp 56,2 juta, perak Rp 33,7 juta dan jika lebih dari 10 orang untuk emas Rp 168,7 juta, perak Rp 84,3 juta, dan perunggu Rp 50,6 juta.

Sementara itu untuk Manager yang emas mendapat Rp 25 juta, perak Rp 15 juta, perunggu Rp 10 juta. Kemudian untuk pelatih Rp 30 juta, perak Rp 17 juta, perunggu Rp 12 juta. Terakhir untuk Official medali emas mendapat Rp 10 juta, perak Rp 7,5 juta dan, perunggu Rp 5 juta.

Penulis: Syakurah
Editor: Nicha Ratnasari



AGENDA NASIONAL: Penurunan Padaw Tuju Dulung menjadi salah satu Rangkaian Iraw Tengkyu XII yang masuk dalam agenda nasional.

Bangga, Iraw Tengkyu XII Masuk Agenda KEN

TARAKAN-Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kaltara Dr Bustan SE.,M.Si menghadiri penutupan Iraw Tengkyu XII yang digelar di Wisata Ratu Intan Pantai Amal, Minggu (08/10).

Rangkaian kegiatan yang telah berlangsung sejak 01 Oktober lalu ini, menampilkan pekan kebudayaan daerah dan olahraga tradisional serta pawai kebudayaan.

Puncak iraw ini di tandai dengan penurunan dan pelarungan Padaw Tujuh Dulung Iraw. Padaw tuju dulung merupakan bahasa suku Tidung yang berarti perahu tujuh haluan.

Dalam sambutannya, ia menjelaskan Iraw Tengkyu merupakan

acara adat yang dilakukan secara turun-temurun masyarakat suku Tidung yang mendiami Kota Tarakan.

“Upacara ini sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih masyarakat suku Tidung kepada Tuhan atas limpahan hasil laut yang diberikan,” katanya membacakan sambutan gubernur.

Pada kesempatan ini juga, gubernur memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kota Tarakan dan seluruh masyarakat suku Tidung yang telah berupaya melestarikan tradisi ini.

Ia berharap, dengan diselenggarakannya kegiatan ini, masyarakat suku Tidung dapat lebih mengenal dan memahami budayanya sendiri.

Dikatakan juga, sesuai dengan

rilis dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (parekraf), Iraw Tengkyu 2023 ini merupakan salah satu bagian dari 110 Karisma Event Nusantara (KEN).

“Tentunya kita berharap, Iraw Tengkyu akan selalu menjadi bagian dari KEN tiap tahunnya. Untuk itu tradisi ini harus dikelola dengan baik dan profesional sehingga menjadi magnet wisatawan domestik maupun mancanegara,” pungkasnya.

Selain dihadiri langsung Walikota Tarakan Khairul, turut hadir Inspektur li Kementerian Parekraf Kamal Rimosan, Ketua APEKSI Nasional Arya Bima, unsur Forkopimda, dan para tokoh masyarakat. **(dksip)**



PELEPASAN : Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum didampingi Ketua Asprov PSSI Kaltara, Syarwani S.Pd, M.Si melepas kontingen Pra PON Cabor Sepak Bola di Gedung Gadis, Sabtu (7/10).

Gubernur Harapkan Cabor Sepak Bola Kaltara Lolos PON Aceh Sumut

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H, M.Hum berharap kontingen Kaltara mendapatkan hasil terbaik di Pra Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) ke 21 di Balikpapan dan Samarinda.

Hal ini disampaikan Gubernur saat melepas Kontingen Pra PON Cabang Olahraga Sepak Bola asal Kaltara di Ruang Serbaguna Gedung Gadis, Sabtu (7/10) sore.

Ia berharap provinsi ke 34 ini mampu berlaga pada ajang PON Aceh dan

Sumatera Utara tahun depan. Para Kontingen Kaltara ini akan berlaga melalui Pra Kualifikasi PON cabang olahraga Sepak Bola di Balikpapan dan Samarinda mulai 14-21 Oktober mendatang.

Menurutnya, Pra Kualifikasi PON merupakan langkah awal yang harus dilewati. Karena itu, para atlet harus selalu menjaga kesehatan dan mengikuti arahan pelatih yang akan diawali dengan sesi pemusatan latihan di Kota Bontang, Kaltim.

“Tetap jaga semangat juang dan

semangat pantang menyerah tunjukkan yang terbaik pada pelaksanaan babak kualifikasi,” ucap Gubernur Zainal A. Paliwang.

Semoga mendapat hasil yang terbaik dan dapat membawa Kaltara berlaga pada PON Aceh dan Sumatera Utara tahun 2024 mendatang.

Pelepasan kontingen turut dihadiri Ketua KONI Provinsi Kaltara, H. Muhammad Nasir, SE., Ketua Asprov PSSI Provinsi Kaltara, Syarwani, S.Pd., M.Si. dan serta seluruh official Tim Sepak Bola. **(dkisp)**



HUT KALTARA: Pemprov memastikan Ketua MPR RI menjadi Irup Hari Jadi ke 11 Provinsi Kaltara. Tampak pelaksanaan HUT ke 10 Kaltara dihadiri Mendagri, Muhammad Tito Karnavian.

Ketua MPR RI Bakal Jadi Irup HUT Kaltara ke-11

TANJUNG SELOR - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Bambang Soesatyo, akan menjadi Inspektur Upacara (Irup) dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang ke-11 pada tanggal 25 Oktober mendatang.

Hal itu disampaikan Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., saat memimpin apel rutin Pemprov Kaltara di Lapangan Agath-

is, Tanjung Selor, Senin (9/10/2023).

"Saya minta kepada seluruh rekan-rekan ASN dan Non ASN untuk bersama-sama mendukung kelancaran pelaksanaan HUT Kaltara 2023," kata Datu Iqro.

Datu Iqro lalu bicara terkait anggaran. Ia meminta OPD Pemprov segera pacu penyerapan anggaran, mengingat sudah memasuki akhir tahun.

"Tidak terasa sudah masuk bulan Oktober. Saya minta serapan anggaran dipacu, jangan sampai akhir

tahun masih banyak anggaran yang tersisa," ujarnya.

Datu Iqro juga meminta agar para ASN dan Non-ASN Pemprov Kaltara bekerja dengan maksimal dan sesuai dengan aturan.

"Saya berharap semua ASN dapat menjalankan kinerja dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Sehingga kita terhindar dari tindakan melawan hukum," harapnya. **(dkisp)**



PEMBUKAAN : Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum berpasangan dengan Atlet Bulutangkis Dunia, Tontowi Ahmad di Kejuaraan Bulutangkis terbesar se Kaltara di Gor Naga Mas Kota Tarakan, Jumat (6/10) lalu.

Pembukaan Kejuaraan Bulutangkis Terbesar Se-Kaltara Dihadiri Atlet Kelas Dunia

TARAKAN - Kejuaraan bulutangkis terbesar se-Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2023, KJA with Lantamal XIII Open 2023 resmi dibuka oleh Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum di Gedung Olahraga (Gor) Naga Mas Kota Tarakan pada hari Jumat (6/10).

Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 TNI, Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) XIII Tarakan bersama PT Kaltara Jaya Abadi (KJA Group) menggelar event kejuaraan bulutangkis terbesar se-Kaltara tahun ini.

Tak hanya diramaikan oleh atlet Kaltara, kejuaraan tersebut juga dihadiri oleh Atlet Dunia asli Indonesia yaitu Liliyana Natsir, Tontowi Ahmad, dan Greysia Polii, juga Taufik Hidayat yang direncanakan hadir pada penutupan kejuaraan.

Kejuaraan yang berlangsung mulai tanggal 6-10 Oktober tersebut mendapat atensi yang meriah dari masyarakat sebagai wujud dukungan terhadap olahraga bulutangkis di Kaltara.

Gubernur mengapresiasi atas terselenggaranya event kejuaraan tersebut karena kompetisi daerah sangat dibutuhkan untuk menjangkau bibit-bibit atlet asli putra daerah Kaltara.

"Kompetisi lokal sangat kita butuhkan untuk meningkatkan prestasi atlet-atlet kita dan mencari bibit-bibit muda berbakat yang bisa kita latih dan mampu bersaing di kancah yg lebih tinggi," ucap Gubernur Zainal Paliwang.

Zainal Paliwang juga berharap institusi lain baik pemerintah maupun swasta dapat menggelar kompetisi

serupa, tak hanya cabang olahraga bulutangkis namun juga di cabang olahraga lainnya.

"Saya berharap institusi lain dari pemerintah maupun swasta mengadakan kegiatan serupa agar para atlet memiliki pengalaman dan jam terbang dalam berkompetisi," lanjut Zainal Paliwang dilanjutkan membuka kejuaraan.

Kejuaraan tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat penting di Kaltara diantaranya Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Bustan, S.E., M.Si., Komandan Lantamal XIII Tarakan Laksamana Pertama TNI Deni Herman, S.T., M.A.P., M. Tr.Opsla., CHRMP, CFA., Kepala BIN Daerah Kaltara, Marsma TNI Aminul Hakim, serta unsur Forkopimda Kaltara. (dkisp)



Bangun Semangat Keragaman di Bumi Intimung, Gubernur Apresiasi Pemecahan Rekor Dunia Sa'ung Terbanyak

MALINAU - Semangat keberagaman menjadi tema besar dalam pelaksanaan Irau ke 10 dan HUT ke 24 Kabupaten Malinau tahun ini. Tampak Gubernur dan Wagub Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum - Dr Yansen TP, M.Si juga ikut menghadiri agenda tahunan itu di Lapangan Pro Sehat Intimung, Sabtu (6/10)

Gubernur mengungkapkan rasa haru dan bangganya dalam rangkaian acara ini. "Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, saya sangat bangga dan berbahagia karena dapat bersilaturahmi bersama saudara-saudara dalam suasana yang hangat," ucap Zainal (sapaan akrab Gubernur Kalimantan

Utara).

Rangkaian diawali dengan acara penyambutan secara adat, lalu acara pembukaan HUT yang dihadiri oleh Bupati Malinau Wempi W. Mawa, SE., Wakil Bupati Malinau Jakaria, SE., M.Si., Perwakilan Kepala Daerah serta Tokoh Masyarakat Kabupaten Malinau.

Lalu dilanjutkan dengan pawai karnaval yang diikuti oleh seluruh etnis, paguyuban, opd, dan seluruh unsur masyarakat. Melintas didepan panggung Padan Liu' Burung peserta berjalan kaki menggunakan sa'ung/kedabang (Topi Adat Khas adat Kalimantan) yang akan menuju ke area Kantor Kecamatan Malinau Kota.

Gubernur menilai antusiasme mas-

yarakat mengikuti rangkaian ini sangat tinggi, terlihat dari semangat mereka mengikuti serta menyaksikan acara ini penuh semangat walaupun cuaca panas terik cukup menyengat.

"Semoga seiring bertambahnya usia ini, dapat segera terwujud Kabupaten Malinau yang mandiri, damai dan sejahtera," tutup Zainal dalam sambutannya.

Disela-sela acara, Pemerintah Kabupaten Malinau serta para masyarakat yang turut dalam karnaval budaya dengan menggunakan kedabang/sa'ung ini mampu memecahkan rekor baru yang langsung dinilai oleh Museum Rekor Indonesia (MURI) dan Rekor Dunia. **(dkisp)**



UPGRADING : Karo PBJ Setprov Kaltara, Amir Hamsyah menghadiri pelantikan dan upgrading KPMKU Makassar belum lama ini.

Wakili Gubernur, Karo PBJ Berikan Motivasi kepada KPMKU Makassar

MAKASSAR – Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Setprov Kaltara, Amir Hamsyah menghadiri Pelantikan, Upgrading dan Raker yang digelar oleh Keluarga Pelajar Mahasiswa Kalimantan Utara (KPMKU) Periode 2023-2024. Agenda tersebut mengambil tema “Membangun Kepengurusan Yang Aktif, Inovatif dan Cerdas Dalam Menjalankan Roda Organisasi”, Kamis, (5/10) lalu. Dalam sambutannya, Amir Ham-

syah menyampaikan apresiasi kepada KPMKU atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia juga berpesan kepada para pengurus yang baru dilantik untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. “Organisasi dapat memberikan berbagai manfaat bagi mahasiswa. Perluas wawasan dan keterampilan. Organisasi juga dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapat pengala-

man baru,”katanya. Karena itu, ia berharap KPMKU dapat menjadi wadah bagi para pelajar dan mahasiswa Kalimantan Utara untuk mengembangkan potensi dan kreativitasnya. Amir Hamsyah menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung kegiatan KPMKU sesuai dengan Visi Misi Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera. (dkisp)

Koran DIGITAL
MEDIA KALTIM.com
Lebih Dekat dengan Satu Klik

<http://koran.mediakaltim.com/>

INFO & PEMASANGAN IKLAN
CP. 0811 5405 033

media_kaltim mediakaltimdotcom mediakaltim.com media kaltim



ISTIMEWA

Camat Marangkayu, Ambo Dalle

Gandeng Dunia Usaha, Kecamatan Marangkayu Sukses Tangani Stunting

TENGGARONG - Penanganan stunting di Kutai Kartanegara (Kukar), memang menjadi catatan penting. Berbagai upaya dilakukan, agar target stunting menyentuh angka 14 persen, setidaknya pada 2024 mendatang. Hal positif pun diklaim menunjukkan penanganan stunting perlahan membuahkan hasil. Salah satunya di Kecamatan Marangkayu.

Ambo Dalle, camat Marangkayu, pun mengklaim kasus stunting di wilayahnya menurun. Diakuinya dengan mendapat dukungan dari segala pihak, salah satunya dari dunia usaha dan sektor swasta. Yakni perusahaan minyak dan gas (migas) yang berinvestasi di Kecamatan Marang-

kayu. Sebut saja, PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) dan PT Pertamina Hulu Sangasanga (PHSS).

"Jadi masalah stunting ini, Alhamdulillah di Kecamatan Marangkayu ada penurunan," jelas Ambo Dalle saat dikonfirmasi.

Dukungan yang dimaksud pun, seperti upaya pemenuhan gizi masyarakat Kecamatan Marangkayu, terutama di ring 1 wilayah operasi mereka setiap bulannya. PHKT misalnya, yang menyalurkan makanan berupa telur dan gizi lainnya ke warga secara langsung. Dengan terlebih dahulu dikumpulkan di kantor kecamatan.

Selain itu juga, mengantar langsung ke sekolah-sekolah. Hingga saat ini,

terus rutin dilaksanakan oleh perusahaan migas tersebut. "Penanganan stunting ini sesuai arahan Bupati Kukar yang ingin Kukar angka stuntingnya turun," lanjutnya.

Pengendalian kemiskinan ekstrem pun turut menjadi perhatian. Yakni melalui proses verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan.

"Jangan sampai ada masyarakat yang mampu tapi masih masuk data DTKS," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari

Fasilitasi UMKM, Festival Pekan Raya Sebulu 2023 Digelar Selama Sepekan

TENGGARONG-Berbagai festival terus digelar di Kutai Kartanegara (Kukar), tepatnya di Kecamatan Sebulu. Festival Pekan Raya Sebulu 2023 ini akan digelar selama 5 hari, yakni sejak tanggal 11 Oktober hingga 15 Oktober 2023.

Diketahui di bulan yang sama, juga akan digelar Festival Pesisir di Kecamatan Muara Badak, di Pantai Panrita Lopi. Berkolaborasi bersama Tirtonegoro Art Festival.

Camat Sebulu, Edy Fahrudin, mengatakan Festival Pekan Raya Sebulu 2023 ini menjadi hajatan m Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar. Tujuannya untuk meningkatkan dan membangkitkan gairah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Jadi dalam rangka untuk peningkatan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Sebulu," ungkap Edy.

Nantinya, akan lebih banyak seni dan budaya lokal Sebulu dalam pergelarannya. Dimana menjadi panggungnya para anak-anak muda lokal asli Sebulu. Seperti didalamnya akan digelar penampilan seni tari tradisional dan fashion show.

Di samping juga akan menghadirkan hiburan masyarakat. Seperti Zumba Party, lomba mewarnai, live musik hingga hiburan dangdut. "Acaranya nanti dilaksanakan di lapangan Desa Sebulu Ulu, Kecamatan Sebulu," pungkasnya.

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari



ISTIMEWA

Camat Sebulu, Edy Fahrudin

Cegah Pergaulan Bebas, Pemdes Bloro Siapkan Pembinaan Keagamaan dan Olahraga



ISTIMEWA

Kepala Desa Bloro, Muhamad Muhtar

TENGGARONG - Pemerintah Desa (Pemdes) Bloro, Kecamatan Sebulu, menunjukkan kepeduliannya kepada generasi mudanya. Memastikan anak-anak hingga pemuda dan pemudinya tidak terjerumus dalam hal-hal negatif. Salah satunya dengan menyiapkan pembinaan dalam hal keagamaan dan olahraga.

Dijelaskan oleh Kepala Desa (Kades) Bloro, Muhamad Muhtar, untuk pembinaan keagamaan akan mendatangkan guru agama atau ustaz. Yang nantinya akan mengajar anak-anak maupun pemuda Desa Bloro untuk belajar kaligrafi, mengaji, bahkan untuk mencetak Hafiz Quran.

Bahkan saat ini, perangkat desa tengah melakukan pendataan warga yang nantinya akan ikut belajar mengaji. "Desayang nantinya mengadakan untuk masyarakat, (pembelajaran) difokuskan di kantor desa," ujar Muhtar.

Sementara untuk bidang keolahragaan, beberapa pembinaan akan dilakukan oleh Pemdes Bloro. Seperti

pembinaan pelatih sepakbola, pembinaan Sekolah Sepak Bola (SSB), olahraga bola voli. Serta olahraga yang kini sedang diminati, yakni mini soccer.

Tujuannya, ia ingin mencetak pemuda-pemudi yang nantinya bisa mewakili Kutai Kartanegara (Kukar) diajang Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ). Sementara di olahraga, bisa mencetak atlet-atlet handal asli putra daerah untuk membela panji Kukar.

"Untuk anak-anak kita biar kurang main HP, kalau ada kegiatan pembinaan SSB usia dini, supaya anak-anak ini melakukan hal positif," lanjutnya.

"Kalau dengan agama dan olahraga bisa mengontrol diri dan tidak terjerumus di hal-hal yang negatif, karena jamannya HP ini luar biasa. Itu harapan kita penguatannya, akan lebih fokus lagi pada tahun depan (2024)," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari



RAFI'I/MEDIA KALTIM

Pelanggar yang menyetor denda, pasca disidang oleh PN Tenggarong.

Langgar Perda Trantibum, 39 PKL Terjaring Razia Ikuti Sidang Tipiring

TENGGARONG - Satuan Polisi Pamong Praja Kutai Kartanegara (Satpol PP Kukar), bersama Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong dan Polres Kukar, menggelar sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) kepada 17 orang di Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong, pada Senin (9/10/2023) pagi.

Ini menjadi sidang tahap pertama, lantaran pada Rabu (27/9/2023) lalu, Satpol PP Kukar menjangring sebanyak 39 Pedagang Kaki Lima (PKL). Di mana mereka terbukti melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2023 terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum

(Trantibum), Pasal 20 dan Pasal 21. Puluhan pedagang ini berjualan di atas fasilitas umum (fasum), seperti di atas drainase, trotoar.

Sebanyak 3 lokasi razia yang digelar oleh Satpol PP Kukar. Yakni di Jalan Danau Semayang dan Jalan Maduningrat, Kelurahan Melayu. Serta di sepanjang Kelurahan Timbau.

"Hari ini di sidang 17 orang, sisanya pada hari Jumat (13/10/2023) dijadwalkan sisanya, atau Senin (16/10/2023) menunggu jadwal dari PN Tenggarong," ungkap Kasi Penyidikan dan Penyelidikan Satpol PP Kukar, Awang M Indrawarman, Senin (9/10/2023).

Sanksi yang dijatuhkan pun, dikatakan Indra, hanya sebatas sanksi denda. Yakni berkisar dari angka Rp 300-800 ribu. Tergantung besar dan kecilnya pelanggaran yang dilakukan oleh PKL yang terjaring. Namun sebelumnya, Satpol PP Kukar melakukan penyitaan barang bukti, berupa tabung gas dan Kartu Identitas Penduduk (KTP) pelanggar.

"Saya rasa ini bisa memberikan efek jera bagi pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Raff'i
Editor : Nicha Ratnasari



MERCURE

HOTEL

SAMARINDA

GASTRONOMY PACKAGE

Nikmati penawaran spesial menginap di ibis Samarinda sambil menikmati hidangan lezat di restoran. Hanya dengan tambahan mulai dari Rp 24 ribu, Anda akan mendapatkan fasilitas sarapan dan kredit voucher F&B sebesar Rp 100 ribu di restoran kami.

Dapatkan diskon 5% untuk anggota ALL serta tambahan 10% untuk anggota Accor Plus.

Berlaku hingga 30 Desember 2023

SCAN BARCODE
UNTUK MELIHAT RATE



Informasi selengkapnya hubungi:

@mercure_samarinda

0811 - 551 - 6000

all.accor.com



PROMO TRAKTIR TEMAN BUY 4 GET 1 FREE

Start From ^{Rp}15.000 nett/person



Nasi Goreng Kampung



Mie Goreng Kampung



Tempe Goreng Tepung



Pisang Goreng Kaya



Teh Tarik Spirit

BEBAS PILIH MENU !

*syarat dan ketentuan berlaku

www.hotelgrandkartika.com/inspirasi



Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman.

Sakirman Dorong Pusat Penggilingan Padi yang Mangkrak Ditindaklanjuti

TANJUNG REDEB – Mangkraknya pusat penggilingan padi di Kampung Sei Bebanir Bangun dinilai Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman membutuhkan perhatian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dia mengatakan, sepehaman dirinya penggilingan padi tersebut milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Menurutnya sangat disayangkan jika mesin penggiling padi itu tidak berfungsi. "Padahal itu bisa memudahkan petani. Tetapi nanti

saya akan coba koordinasikan dengan OPD terkait," katanya.

Dirinya mengaku pernah mempertanyakan keberadaan pusat penggilingan padi tersebut kepada petani Kampung Sei Bebanir Bangun. "Mereka mengakui bahwa jika pusat penggilingan padi itu berfungsi akan mempermudah mereka," tuturnya.

Menurut Sakirman, dengan adanya penggilingan padi tersebut, tentu para petani dapat memproduksi padi

dengan kualitas premium. "Mengenai pengelolaannya, seharusnya ada kelompok tani yang dibina agar mesin tersebut berfungsi dengan maksimal," ujarnya.

Kendati demikian, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap ada pertemuan antara petani dengan OPD terkait. "Tujuannya untuk membahas solusi, supaya mesin tersebut bisa beroperasi kembali," pungkasnya. (adv/dez)

Rudi Sorot Air Bersih di Kecamatan Segah yang Dikeluhkan Masyarakat



Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong

TANJUNG REDEB - Masyarakat Kecamatan Segah mengeluhkan sumber air bersih mereka yang mulai tercemar. Hal itu menyita perhatian Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong.

Dia mengatakan, Kecamatan Segah merupakan salah satu sumber air bersih yang digunakan PDAM. "Artinya, kalau masyarakat di Segah sudah mengeluhkan soal air bersih mereka, maka secara logika akan berdampak juga ke wilayah perkotaan," ungkapnya.

Menurutnya, jika kondisi air bersih di Tanjung Redeb sudah layak, maka yang harus diperhatikan oleh pihak terkait adalah wilayah penghasilnya. "Tingkatkan pengelolaan air bersih di wilayah sumbernya, jangan hanya terpusat di perkotaan saja, karena air bersih ini siapapun membutuhkan," katanya.

Dirinya mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau harus memasukkan persoalan air bersih di Kecamatan Segah ke skala prioritas. "Lebih bagus seluruh kecamatan dan kampung yang membutuhkan atau mengeluhkan air bersih diprioritaskan," tegasnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini menyebut, air bersih merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. "Semoga segera ada tindak lanjutnya dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan air bersih ini," tandasnya. (adv/dez)

Suharno: Segera Sosialisasikan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

TANJUNG REDEB – Dengan disahkannya Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Perda didukung Wakil Ketua I DPRD Berau, Suharno.

Dia mengatakan, pajak dan retribusi merupakan nafas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau karena menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Jadi hal ini sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan Pemkab Berau dalam rangka memberikan pelayanan publik," katanya.

Menurut Suharno, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber perpajakan daerah yang baru serta penyederhanaan jenis retribusi. "Yang dapat dipungut dengan efektif, biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah serta restrukturisasi pajak daerah dan rasionalisasi retribusi daerah," tambahnya.

Dijelaskannya, hal tersebut dilakukan dengan tujuan mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemkab Berau. "Selain itu juga mendorong kemudahan berusaha iklim investasi yang kondusif, daya saing daerah dan penciptaan lapangan kerja yang luas," terangnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengingatkan Pemkab Berau untuk mensosialisasikan Perda tersebut kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat mengetahui sejak dini.

"Apalagi Raperda ini menyangkut pajak dan retribusi yang notabene merupakan kewajiban setiap lapisan masyarakat. Mereka harus mengetahui kemana uang

yang mereka bayar selama ini, yaitu untuk membangun jalan maupun infrastruktur untuk masyarakat juga," tandasnya. (adv/dez)



Wakil Ketua I DPRD Berau, Suharno

Syarifatul Nilai Internet Harus Dirasakan Seluruh Masyarakat



Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah

TANJUNG REDEB – Masih banyaknya masyarakat di beberapa kampung yang mengeluhkan tidak adanya jaringan internet disorot Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah.

Ia menuturkan, internet merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan juga dibutuhkan oleh aparaturnya kampung untuk memaksimalkan pelayanan. “Apalagi di era digital seperti saat ini, wajar saja jika masyarakat membutuhkan internet,” katanya.

Mengenai kebutuhan itu, Syarifatul menyebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau seharusnya mencari solusi melalui program 1.000 titik WiFi gratis. “Jadi program tersebut dapat dirasakan masyarakat secara langsung,” tuturnya.

Dirinya menilai, pemasangan WiFi gratis harus dilakukan survei terlebih dahulu mengenai lokasi mana yang pantas mendapatkan internet. “Karena selain masyarakat butuh, kantor-kantor pemerintahan yang ada di kampung juga membutuhkan untuk mengirim data dan laporan,” imbuhnya.

Politikus Golkar ini berharap pemerintah bisa lebih fokus dalam mengentaskan blank spot. “Harus segera ditindaklanjuti agar masyarakat merasakan manfaatnya,” pungkasnya. (adv/dez)

Madri: Pengurusan PBG Jangan Memberatkan Masyarakat

TANJUNG REDEB – Perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dianggap memberatkan masyarakat. Hal itu disorot Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

Dirinya menilai, jika perubahan tersebut memberatkan, lebih baik direvisi. Sebab dengan keluarnya PBG, persyaratan pembangunan rumah atau gedung semakin sulit, karena masyarakat harus memenuhi persyaratan untuk bisa mendirikan bangunan.

“Dengan begitu saya khawatir, banyak masyarakat nantinya mendirikan rumah tidak memiliki izin yang akhirnya menjadi bangunan liar,” tuturnya.

“Menurut saya harus disesuaikan rendah menengah atas. Tujuannya supaya tidak memberatkan atau membebani masyarakat. Peraturan itu nanti akan berkesinambungan dengan kebijakan,” tambahnya.

Dia mengungkapkan, jika harus menyamaratakan pengurusan perizinan PBG dengan ekonomi ke atas atau pihak tiga yaitu pengusaha, tentu saja masyarakat menganggap akan kesulitan. “Itu karena dibutuhkan perencanaan konsultan yang profesional,” katanya.

Politikus Nasional Demokrat (NasDem) ini mencontohkan bangunan yang berada di Jalan Ahmad Yani atau dikenal sepanjang tepian Teratai, di mana tidak ada perubahan satu pun titik letaknya. Sebab, jika bangunan tersebut harus diubah, izin bangunan itu bakal dikurangi bahkan mencapai 5 meter.

Karena itu, ia mengimbau OPD terkait agar harus melakukan kajian dan evaluasi terlebih dahulu. “Atau harus dilakukannya sosialisasi dahulu 2-3 bulan sebelum perencanaan dengan menggunakan masyarakat yang

akan memakai, menyewa lahan atau aset-aset pemerintah daerah,” katanya.

Hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang ingin membangun bangunan sesuai prosedur PBG. “Karena mereka juga bayar kepada pemerintah daerah. Jangan terlalu memaksakan,” pungkasnya. (adv/dez)



Ketua DPRD Berau, Madri Pani



Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Capt Hatta Umar.

DPRD Sebut Fasilitas Pasar Sepinggian Perlu Renovasi

BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan mengusulkan pasar tradisional Sepinggian, Balikpapan Selatan untuk dilakukan renovasi. Ini tampak terlihat dari kondisi sejumlah fasilitas yang ada di pasar Sepinggian sudah tidak layak. Bahkan pasar tradisional ini sudah lama tidak tersentuh perbaikan.

Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Capt Hatta Umar mengatakan, kondisi sejumlah fasilitas yang ada di pasar Sepinggian sudah tidak layak. Maka pemerintah sudah saatnya mulai membahas anggaran perbaikan. Di mana hasil sidak ke pasar tersebut menunjukkan perlunya perbaikan fasilitas. Seperti lantai pasar, dinding dan saluran drainasen-

ya yang mampet.

"Banyak di situ yang harus dibenahi, termasuk lantainya. Saluran-salurnya sudah banyak yang mampet tidak lancar. Kami ingin ada informasi sejauh mana penanganannya di sana," ujarnya Senin (9/10/2023).

Lebih lanjut Hatta menjelaskan, pemerintah punya tanggung jawab melakukan renovasi ke pasar tradisional. Agar kondisi pasar yang ada dapat tertata rapih dan nyaman bagi pengunjung. Apalagi pasar Sepinggian merupakan satu-satunya pasar tradisional yang cukup besar yang ada di Kecamatan Balikpapan Selatan.

"Yang jelas, kami sudah sidak sejumlah pasar kami datangi khusus di Sepinggian banyak sekali yang harus

dibenahi terutama lantainya sudah licin. Karena sudah lama tidak ada perbaikan," jelasnya.

Hatta meminta perhatian lebih pemerintah terhadap renovasi pasar tradisional. Mengingat hingga kini baru pasar Klandasan dan Pandan Sari yang mendapatkan anggaran perbaikan.

"Kalau hemat saya, kita perlu namanya kemajuan. Dalam arti pasar kita bisa dibuat menjadi pasar yang modern dan mewah. Tapi jangan juga meninggalkan kesan tradisional," tutupnya. **(ADV/DPRD-Balikpapan/Bom)**

Pewarta : Aprianto

Editor : Nicha Ratnasari



IST

Ilustrasi guru honorer sekolah swasta.

Dewan Kembali Usulkan Tambahan Insentif Guru Honorer Sekolah Swasta

BONTANG - Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mengungkapkan, bahwa DPRD Bontang kembali mengusulkan agar insentif para guru honorer di sekolah swasta jenjang PAUD hingga SMP dinaikkan.

Menurutnya, guru swasta ini memiliki peran penting dalam mendidik karakter anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, sama seperti halnya para guru-guru di sekolah negeri.

"Para guru swasta memiliki hak yang sama untuk mendapat kenaikan insentif. Karena mereka sama-sama berjuang mencerdaskan anak bangsa," ujarnya.

Jumlah APBD-Perubahan 2023 yang mencapai Rp 2,5 triliun dinilai AH sapaan akrabnya, cukup untuk mencover tambahan insentif kepada

dua ribu guru honorer di kota taman. "Saat ini guru tingkat SMA dan SMK ranahnya sudah di Pemprov Kaltim. Saya rasa kalau anggaran segitu, bisalah mencover permintaan tambahan insentif para guru swasta," timpalnya.

Sementara itu, Ketua Persatuan Guru Swasta (PGS) Bontang Baidlowi mengatakan, sudah 10 tahun terakhir tidak ada kenaikan insentif bagi para guru swasta. Ia pun meminta agar besaran kenaikan insentif minimal bisa 50 persen. Apalagi harga bahan pangan pokok di pasaran terus meningkat.

"Ini sudah angka yang tepat, tiap guru maksimal mendapat kenaikan Rp 1,5 juta tiap bulan," ujarnya.

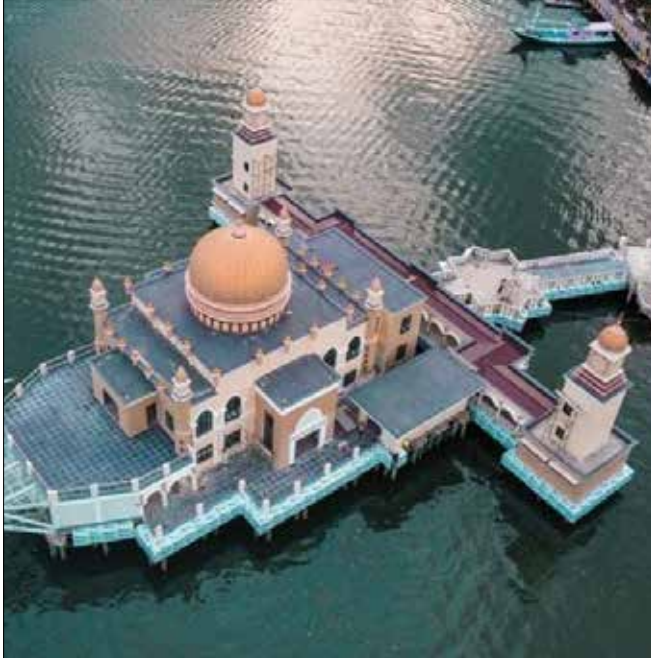
Menanggapi hal itu, Sekretaris

Daerah (Sekda) Aji Eryawati menjelaskan, bahwa memang belum mencantumkan untuk penambahan insentif guru honorer. Sebab, regulasi terkait itu tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2018. Sementara, terkait kondisi keuangan daerah dijelaskan Aji tidak ada masalah.

Namun, pemkot tidak mau menabrak regulasi. Ia pun belum bisa mematok target terkait apakah penambahan ini akan diajukan tahun depan.

"Memang usulan untuk penambahan insentif guru honorer ini muncul di detik-detik sebelum pembahasan APBD perubahan. Kami belum bisa tambah karena ketentuannya pakai Perda. Jadi harus revisi perda dulu," terangnya. (al/adv)

Pemerintah Diminta Perhatikan Pemeliharaan dan Kebersihan Masjid Terapung



BONTANG – Masjid Terapung Darul Irsyad Selambai, Loktuan, kurang mendapatkan perhatian pemerintah. Hal itu terbukti dengan minimnya perawatan pada masjid yang telah diresmikan dan difungsikan pada awal Maret 2022 lalu.

Hal itu disayangkan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Faisal.

Diungkapkan anggota dewan yang berdomisili di Selambai tersebut, Masjid Terapung saat ini menjadi ikon wisata religi kota taman yang banyak dikunjungi masyarakat, namun sangat disayangkan kurang mendapat perhatian terkait pemeliharaan fasilitas masjid.

“Padahal sudah setahun diresmikan, tapi kurang diperhatikan pemeliharaan fasilitasnya,” ujarnya.

Dirinya meminta agar kebersihan masjid lebih dijaga dan dikelola dengan baik. Selain petugas kebersihan, juga bisa melibatkan dan mengajak para jemaah masjid.

“Petugas kebersihan kerjanya cuma Senin sampai Jumat, jadi Sabtu Minggu tidak ada yang bersihkan, apalagi kalau ada kapal datang, banyak penumpang kapal pakai toilet itu,” ungkap Politikus Partai Nasdem ini. (al/adv)

Andi Faiz Apresiasi Rampungnya Pembangunan Lift di Pasar Tamrin

BONTANG – Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mengapresiasi rampungnya fasilitas Pasar Taman Rawa Indah (Tamrin), yaitu pembangunan lift. Hadirnya lift bakal mempermudah mobilisasi angkutan barang dagangan dan para pembeli.

Menurutnya, alasan sepinya pengunjung di Pasar Tamrin dikarenakan akses yang sulit, sehingga para pedagang memilih mengosongkan lapaknya di pasar berlantai 4 tersebut dan memilih untuk berjualan di luar.

“Sejak awal salah satu yang jadi keluhan pedagang adalah akses yang sulit di pasar, sehingga banyak yang milih jualan di luar. Pemerintah memang sudah seharusnya berbenah,” ujarnya.

Maka itu, dirinya berharap dengan adanya pembenahan fasilitas yang ada di pasar bisa meningkatkan geliat ekonomi di pasar semakin baik lagi. Para pedagang pun bisa kembali lagi berjualan di dalam pasar.

“Para pedagang di luar pasar diharapkan dapat pindah dan kembali mengisi kios-kios yang telah disediakan. Area luar pasar bisa disterilkan menjadi lebih rapi dan bersih,” terangnya.

Maka itu, Politikus Partai Golkar ini meminta kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait, agar segera berkoordinasi terkait rencana relokasi kepada para pedagang di luar, agar bisa segera pindah ke dalam pasar. Arus lalu lintas pun menjadi aman dan tidak terganggu lagi.

“Tinggal dorongan dari semua pihak agar penataan

pasar lebih baik lagi. Mungkin bisa dibuatkan surat perintah kapan mereka harus pindah, jadi tidak mendadak, usahakan upaya persuasif,” tandasnya. (al/adv)



— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000_bontang —

LET'S TEST DRIVE!

EZ Deal
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

AUTO2000 BONTANG
Jl. Biggen Kawana No. 116A, Sebelang Kiri, Bontang Barat, Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD APLIKASI M-TOYOTA

AUTO 2000
member of ASTRA

Urusan Toyota lebih mudah!

AYO IKUTI!! LOMBA VIDEO PENDEK

TEMA
PERAN PUPR
Mendukung Infrastruktur
Destinasi Wisata

TOTAL HADIAH
33 JUTA RUPIAH

DAFTAR SEGERA

<https://forms.gle/xCaP8bLjtdAYkhH7>

NARAHUBUNG / CP :
Heny 081254559928
Shinta 082256114744

SYARAT DAN KETENTUAN LOMBA

1. Peserta lomba terbuka untuk umum dengan usia min 17 tahun (kuota terbatas 40 tim)
2. Peserta lomba berkelompok min 3 orang max 4 orang
3. Video merupakan video pendek berjenis video profil infrastruktur pariwisata Kota Bontang berdurasi max 3 menit dengan resolusi video min 1920x1080px
4. Peserta harus mengisi formulir pendaftaran melalui link : <https://forms.gle/xCaP8bLjtdAYkhH7>
5. Video pendek bertema sesuai tema yang di tentukan
6. Peserta lomba hanya mengirim satu video pendek
7. Video belum pernah dilombakan dan dipublikasikan melalui media apapun
8. Video merupakan karya baru, original bukan hasil plagiat/mengambil sebagian hak cipta oranglain, apabila dikemudian hari terdapat gugatan hak cipta maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peserta lomba
9. Transportasi menuju 3 spot lokasi yang ditentukan oleh panitia dalam pengambilan video difasilitasi oleh dinas PUPR hanya 1 (Satu) hari
10. Video mencantumkan subtitle berbahasa Inggris
11. Video yang dikirimkan menjadi hak milik Dinas PUPR Kota Bontang
12. Wajib follow Instagram @ppid.dpuprbtg dan @bontang_tourism
13. Peserta tidak dipungut biaya apapun
14. Video tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, kesucilaan, moral, SARA, kekerasan, promosi produk komersial serta tidak mengandung unsur pornografi
15. Materi video dapat diterima panitia paling lambat tanggal 05 oktober 2023 pukul 23.59 wita melalui Email : dpupr25@gmail.com dan ke CP : SHINTA (082256114744)
16. Video yang dikirimkan berhak disiarkan atau ditayangkan oleh panitia untuk keperluan media edukasi dan promosi
17. Keputusan panitia dan dewan juri tidak dapat diganggu gugat
18. Informasi teknis lomba akan disampaikan pada technical meeting
19. Hal-hal yang belum diatur akan diinformasikan berikutnya.

Catat Waktunya :

- 21-27 September 2023 Pendaftaran
- 29 September 2023 (pukul 09.00 wita Seremoni peluncuran lomba video dan pukul 14.00 wita Technical Meeting)
- 30 September 2023 (pukul 06.00 wita Spot Hunting di 3 lokasi
 - Karang Pasilan (Snorkling)
 - Kampung Malahing
 - Pulau Beras Basah
 - + additional : Pulau Segajah
- 12 Oktober 2023 (pukul 20.00 wita pengumuman pemenang secara "live" di acara Gala Dinner HUT Kota Bontang Ke-24 di Pendopo Rujab Walikota)



Dra. Nina Dewi MAP saat membuka Pelatihan Dasar Manajemen Bencana.

Pelatihan Dasar Manajemen Bencana BPSDM Kaltim Diikuti 60 Peserta

SAMARINDA - Demi mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dalam penanggulangan bencana, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Pelatihan Dasar Manajemen Bencana pada Senin (9/10/2023), di Aula Utama Kantor BPSDM Kaltim.

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDM Kaltim, Apriyana Rachmawati mengatakan Pelatihan Dasar Manajemen Bencana diikuti oleh 2 angkatan berjumlah 60 peserta selama 4 hari secara klasikal (tatap muka).

"Jumlah peserta 60 orang terdiri dari 30 orang di Angkatan 1, dan 30 orang di Angkatan 2 yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan penanggulangan Bencana di Provinsi Kaltim," ujarnya.

Melalui pelatihan ini dapat meningkatkan Kapasitas SDM dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana seperti yang tertuang da-

lam PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Disebutkan, kegiatan pendidikan dan pelatihan merupakan sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi terjadi bencana.

"Selama mengikuti pelatihan, peserta juga diwajibkan untuk menyampaikan evaluasi terhadap materi, pelaksanaan dan fasilitator," pintanya

Dalam sambutan sekaligus membuka acara, Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, mengatakan pentingnya manajemen bencana tidak dapat dabaikan. "Di seluruh dunia, kita sering kali dihadapkan pada berbagai jenis bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, dan banyak lagi. Selain itu, ada juga bencana buatan manusia seperti kecelakaan industri," ujar Nina.

Oleh sebab itu menurut Nina, mempersiapkan diri dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat dalam manajemen bencana adalah langkah

yang bijak untuk melindungi diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat. "Dengan ini Pelatihan Dasar Manajemen Bencana secara resmi saya buka," ujar Nina.

Diketahui, narasumber Pelatihan Dasar Manajemen Bencana kali ini, berasal dari Pusdiklat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltim, dan Widyaiswara BPSDM Kaltim.

Selain peserta acara pembukaan ini juga dihadiri oleh Kepala BKD Kaltim, Deni Sutrisno, Kepala BPBD, Agus Tianur, Rektor Institut Teknologi Kalimantan, Agus Rubiyanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten PPU, Riviana Noor, Pejabat Administrator, Widyaiswara, Pejabat Pengawas dan Analis Bangkom di Lingkungan BPSDM Kaltim (ADV)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN



<http://dinkes.kaltimprov.go.id>

Dra. Sri Wahyuni M.P.P.
SEKDA PROV. KALTIM

Dr. Akmal Malik, M.Si
TD GUBERNUR KALTIM

dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM

Dinkes Kaltim: Berikan Bayi ASI Eksklusif Guna Cegah Stunting

SAMARINDA- Pemberian ASI (air susu ibu) eksklusif selama enam bulan pertama merupakan salah satu upaya dalam pencegahan bayi stunting. Hal ini dikatakan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin.

"ASI eksklusif artinya bayi hanya mendapatkan ASI tanpa tambahan susu atau makanan lain, termasuk susu kental manis yang tidak baik untuk kesehatan bayi," ungkap Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin, Senin

(9/10/2023).

Ia juga menjelaskan, ASI sudah mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan bayi untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

"ASI mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan zat untuk kekebalan tubuh yang dapat melindungi bayi dari berbagai penyakit," ujarnya.

Sehingga, Jaya mengajak para ibu hamil dan menyusui untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.

Selain itu, juga mengimbau para calon pengantin untuk mengikuti sekolah calon ibu. Karena para calon ibu akan mendapatkan ilmu tentang cara menyusui yang benar, manfaat ASI, dan cara mengatasi masalah dalam menyusui.

"ASI eksklusif adalah investasi masa depan bagi anak kita," tutup Jaya. **(nta/adv, Dinkes)**

Pewartu : *Ernita*

Editor : *Nicha Ratnasari*

Bahaya Penyakit Zoonosis, Jaya Meminta Hewan Peliharaan Divaksin

SAMARINDA- Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersinergi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim melakukan vaksinasi rutin agar masyarakat terbebas dari penyakit zoonosis.

"Kami mengingatkan masyarakat agar mewaspadai penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya," kata Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin, Senin (9/10/2023).

Jaya mengatakan, zoonosis disebabkan oleh mikroorganisme parasit yang dapat berupa bakteri, virus, jamur, serta parasit seperti protozoa dan cacing.

Sedangkan untuk penularan zoonosis, dapat menular melalui tiga cara yaitu langsung, tidak langsung, dan konsumsi. "Beberapa penyakit zoonosis itu, yakni rabies, antraks, dan leptospirosis," ujarnya.

Dinkes Kaltim tengah mengencarkan vaksinasi terhadap anjing liar dan hewan peliharaan lainnya, guna menjadikan wilayah tersebut bebas dari penyakit rabies. "Kami pastikan anjing liar divaksin karena mereka berpotensi menularkan rabies kepada manusia," kata Jaya.

Kendati demikian, hewan peliharaan lainnya pun wajib divaksinasi termasuk kucing. Karena kucing jika terkena rabies juga bisa menyebabkan gejala yang sama dengan anjing. Dan hewan lainnya juga perlu mendapatkan vaksin adalah kera.

Jaya mengimbau kepada masyarakat untuk segera membersihkan luka gigitan hewan dengan air mengalir dan sabun. "Jangan sampai virus rabies masuk ke dalam



ISTIMEWA

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Dr Jaya Mualimin.

tubuh. Segera periksakan diri ke Puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan suntikan anti rabies," ucapnya.

Jaya meminta masyarakat yang memiliki hewan peliharaan sebagai binatang kesayangan dan merawatnya dengan baik. Vaksin untuk hewan peliharaan disediakan secara gratis seperti yang dilakukan untuk sapi dan kerbau.

"Di Kaltim, ada penyakit zoonosis lain yang berasal dari sapi dan kerbau, yaitu anthrax. Kita sudah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan untuk penyakit zoonosis," pungkasnya. **(Nta/adv/Dinkes)**

Pewartu : *Ernita*

Editor : *Nicha Ratnasari*

Pelatihan PKMN, Upaya Turunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi

SAMARINDA- Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar pelatihan penanganan kegawatdaruratan bagi dokter umum, bidan dan perawat di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) primer bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Berau sebagai salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).

"AKI dan AKB di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya. Berdasarkan hasil survei penduduk antara sensus (SUPASI) 2015, AKI di Indonesia adalah 305 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan AKB adalah 24 per 1.000 kelahiran

hidup," jelas Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin, Jumat (6/10/2023).

Menurut Jaya, salah satu faktor penyebab kematian ibu dan bayi adalah komplikasi yang terjadi pada saat masa kehamilan, persalinan dan nifas.

Komplikasi tersebut dapat dicegah dan ditangani bila tenaga kesehatan mampu melakukan identifikasi dini, memberikan pertolongan pertama, melakukan tindakan stabilitas pasien, dan merujuk ke rumah sakit bila perlu.

"Untuk itu, kami mengadakan pelatihan PKMN yang komprehensif dan tepat sasaran bagi tenaga kesehatan di Fasyankes primer dari Kabupaten Berau," ujarnya.

Ditambahkan Jaya, pelatihan ini meliputi teori dan praktik tentang penggunaan partograf, manajemen aktif kala II, resusitas neonatus, pencegahan infeksi, dan rujukan efektif.

Ia berharap pelatihan PKMN tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Berau.

"Kami mengapresiasi kerjasama antara Dinas Kesehatan Kaltim dengan Balai Pengembangan Pendidikan Kesehatan (Bapelkes) Samarinda dalam penyelenggaraan pelatihan ini," pungkasnya. (adv)

Pewarta : *Ernita*

Editor : *Nicha Ratnasari*

Rembuk Stunting, Tingkatkan Sinergitas Provinsi dan Kabupaten/Kota

SAMARINDA- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rembuk stunting tingkat provinsi tahun 2023 untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menurunkan angka stunting di wilayah setempat.

"Kami melakukan koordinasi dengan seluruh dinas terkait untuk percepatan penurunan stunting sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021," kata Jaya, di Hotel Mercure, Senin (9/10/2023).

Jaya mengatakan, dinas terkait dalam penanganan stunting yakni Dinas kesehatan Kaltim, Dinas pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan Dinas Tanaman Pangan.

Ia menjelaskan, dalam rembuk stunting itu bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya menurunkan angka stunting di Kaltim. Dinas kesehatan Kaltim berlaku sebagai koordinator untuk Tim Pengendali Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (TPPS) yang berkoordinasi dengan kepala daerah dari sepuluh kabupaten dan kota se-Kaltim.

Salah satu intervensinya adalah sensitif terhadap lingkungan, rumah sehat layak huni yang disana ada sanitasi yang baik, ketersediaan air yang men-



MEDIA KALTIM

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Dr. Jaya Mualimin

jadi urusan dari Dinas PUPR.

Kemudian, terkait keluarga yang harus dibantu melalui program keluarga harapan harus punya kartu BPJS yang menjadi urusan Dinas Sosial. Untuk pemberian makan bergizi, diupayakan melalui Dinas Pertanian dan Dinas Tanaman Pangan dan Dinas Kelautan.

"Selain itu ditekankan juga pentingnya kesadaran ibu menggunakan ASI eksklusif dan melaksanakan pola asuh yang baik bagi anaknya," ungkap Jaya.

Jaya pun mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak (DKP3A) bersa-

ma BKKBN, dengan program Sekolah Calon Pengantin, Sekolah Ibu Hamil, dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).

"Semua dinas terkait dirangkul dalam koordinasi Dinas Kesehatan Kaltim dalam konvergensi penanganan program," ujarnya.

Kemudian, program intervensi spesifik yang dilakukan Dinas Kesehatan Kaltim, antara lain pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, pemeriksaan kehamilan minimal empat kali bagi ibu hamil, pemberian vitamin A bagi anak-anak, dan pemberian makanan tambahan bagi anak yang mengalami kekurangan energi kalori atau MPASI.

"Ketika ibu melahirkan harus memberikan ASI selama 24 bulan kemudian imunisasi dasar lengkap bagi anak," imbuhnya.

Menurut Jaya, beberapa program intervensi spesifik lainnya terkait anak yakni melakukan timbang berat badan dan diukur tinggi badan serta dipantau setiap bulan dan dilaporkan di TPPS. "Tadi sudah dilibatkan data yang terintegrasi bisa kita lihat sebulan sekali melalui data geospasial, kita bisa melihat bayi lokasinya dimana dan posyandunya apa," pungkasnya. (Nta/adv/Dinkes)

Pewarta : *Ernita*

Editor : *Nicha Ratnasari*



Kepala Bidang Pengelolaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kalimantan Timur (Kaltim), Dyayadi, saat diwawancara Mediakaltim.com beberapa waktu lalu.

Pentingnya Digitalisasi Pengarsipan Data Pribadi Demi Keamanan

SAMARINDA-Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kalimantan Samarinda (Kaltim) mengimbau kepada Aparat Sipil Negara (ASN) dan masyarakat akan pentingnya digitalisasi dalam memanfaatkan teknologi sebagai solusi digital dalam pengarsipan.

Kepala Bidang Pengelolaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kalimantan Timur (Kaltim), Dyayadi mengungkapkan, digitalisasi arsip adalah sebagai upaya untuk mengantisipasi hilangnya data dan arsip berharga akibat bencana alam.

“Sekarang kita harus memanfaatkan teknologi. Arsip pribadi dan arsip penting yang dikelola perangkat

daerah, harus di-scan menjadi bentuk digital. Antisipasi misal terjadi kebakaran, banjir, yang bisa mengakibatkan arsip hilang atau terbakar,” terangnya saat ditemui Mediakaltim.com di Kantor Arsip Jalan Bung Tomo Samarinda Seberang, beberapa waktu lalu.

Tak hanya itu, Dyayadi juga mengatakan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama di lingkungan Kaltim disarankan untuk menyimpan arsip-arsip penting dengan baik dan untuk arsip statis bisa disimpan di DPKD Kaltim. Misalnya, seperti surat-surat tanah kepemilikan gedung pemerintah dan surat-surat penting lainnya yang tidak sering digunakan agar tidak hilang dan jika dibutuhkan

bisa menarik kembali berkasnya untuk digunakan.

Dikatakan, warga Samarinda juga dapat memanfaatkan teknologi ini agar menjaga keamanan berkas penting mereka, seperti ijazah, sertifikat, surat tanah, dan dokumen lainnya.

“Para ASN dan masyarakat saya mengimbau, untuk mengamankan berkas-berkas vitalnya. Dengan cara di-scan, lalu unggah ke Google Drive, kan bisa itu agar nanti kalau mau mencari kembali mudah, mencarinya,” tutupnya. (ADV)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Pustakawan Ahli Madya DPK Kota Samarinda Nurhikmah

Gelar Gerakan Literasi Informasi, DPK Samarinda Akan Kunjungi Sekolah dan Kelurahan

SAMARINDA-Demi meningkatkan pengetahuan literasi informasi di kalangan masyarakat yang tersebar di kota Samarinda, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Samarinda akan gelar gerakan Literasi Informasi di sekolah dan di kelurahan.

Pustakawan Ahli Madya DPK Kota Samarinda Nurhikmah mengatakan target gerakan literasi informasi menasar 10 tempat yang ada di Samarinda. Sementara itu baru-baru ini, gerakan pertama sudah dilakukan oleh DPK Kota Samarinda di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran, Kota Samarinda.

"Baru-baru ini kita sudah menggelar di Perpustakaan Kelurahan Bukuan, jadi sisa 9 tempat lagi. Pada Oktober ini berjalan lagi dan November targetnya selesai," bebernya.

Nurhikmah mendefinisikan literasi informasi itu adalah memahami masyarakat bagaimana mencari mengakses dan memanfaatkan informasi itu dengan benar.

"Salah satu contoh literasi informasi itu misalkan mencari buku bacaan

di perpustakaan, kita harus faham soal jenis buku, ada buku sejarah, sastra, ensiklopedi, kamus bahasa Inggris dan buku lainnya. Setelah itu bagaimana cara memanfaatkan ilmu pengetahuannya," jelasnya.

Saat ini banyak siswa-siswi dan masyarakat tidak mengetahui apa itu literasi dan literasi informasi. Oleh sebab itulah pihaknya menggelar gerakan literasi informasi.

Nurhikmah menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke perpustakaan sekolah-sekolah, banyak sekali dia temui murid yang belum mengerti cara menggunakan kamus. Ini merupakan salah satu hal contoh ketidaktahuan anak-anak soal bagaimana memahami literasi informasi soal buku kamus tersebut.

"Banyak masih anak-anak itu belum mengetahui cara membaca Kamus Bahasa Inggris, karena kan ada kata imbuhan dan kata kerja," ujarnya.

Bahkan ketika DPK Kota Samarinda melaksanakan gerakan literasi informasi di perpustakaan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran beberapa waktu

lalu, masyarakat yang hadir banyak yang tidak tahu mengenai aplikasi penunjang bacaan masyarakat. Misalnya, seperti iKaltim yang dikeluarkan pemerintah provinsi, juga iSamarinda yang dikeluarkan oleh DPK Kota Samarinda.

"Kita datang ke Bukuan kemarin masyarakat itu banyak yang nggak tahu kalau ada aplikasi iKaltim dan iSamarinda," ungkapnya.

Gerakan literasi informasi ini juga bertujuan agar masyarakat dapat menghalau informasi-informasi yang tidak benar seperti hoax, dengan cara menggali kebenaran informasi.

"Jadi setiap informasi masyarakat harus mencari kebenarannya, dengan mengakses situs berita-berita yang kredibel atau mengakses situs Kominfo untuk menggali informasi yang didapat ini benar atau hoax. Jadi nggak main langsung share beritanya," pungkasnya. (ADV)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Resmikan Plant Pertama di Indonesia, Kementerian ESDM: "PLN Miliki Cara Paling Cepat Hasilkan Green Hydrogen"

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengapresiasi langkah cepat dan nyata PLN yang sudah mampu memproduksi green hydrogen melalui Green Hydrogen Plant (GHP) pertama di Indonesia, yang berlokasi di kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang, Jakarta. Bahkan GHP yang dikembangkan melalui subholding PLN Nusantara Power ini mampu memproduksi hingga 51 juta ton hidrogen per tahun.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Yudo Dwinanda Priaadi saat peresmian GHP pada Senin (9/10) menyampaikan bahwa kehadiran GHP tersebut menjadi sebuah inisiasi yang baik untuk mendukung upaya pengembangan energi bersih di Indonesia.

"PLN memiliki cara paling cepat untuk menghasilkan green hydrogen. Kami awalnya berpikir untuk bisa menghasilkan hidrogen hijau ini akan butuh waktu yang lama, memakai panas bumi, solar panel. Ternyata inovasi yang dilakukan oleh PLN mampu mempercepat produksi green hydrogen di Indonesia," ucap Yudo.

Dirinya juga menjelaskan hidrogen hijau merupakan game changer terhadap tantangan transisi energi. Ke depan, penggunaan hidrogen hijau sebagai bahan bakar alternatif akan

dibutuhkan banyak industri.

Tahun ini, pemerintah lewat Kementerian ESDM tengah merampungkan peta jalan hidrogen nasional. Lewat langkah akseleratif PLN dalam membuat GHP pertama ini menjadi bukti dan penguat dari peta jalan strategi hidrogen nasional.

"Tahun ini kita finalisasi nasional hydrogen strategy. Semoga bisa segera kita keluarkan. Alhamdulillah PLN sudah mendahului strategi ini. Sebelum bukunya keluar, sudah ada buktinya dulu," ujar Yudo.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan peresmian GHP pertama di Indonesia ini merupakan buah komitmen PLN dalam mendukung upaya pemerintah dalam melakukan transisi energi. Ke depan, green hydrogen akan menjadi energi alternatif.

"Hari ini menjadi bukti, we walk the talk bahwa komitmen ini kami wujudkan dalam bentuk nyata. Ke depan GHP yang ada ini akan kami kembangkan di pembangkit-pembangkit kami, khususnya yang sejenis, sehingga produksinya bisa semakin besar," ucap Darmawan.

Darmawan menambahkan GHP yang dikembangkan PLN Nusantara Power (NP) merupakan hasil inovasi PLN dalam menjawab tantangan transisi energi dengan memaksimalkan aset yang ada. Inovasi terus akan

dilakukan untuk menghasilkan nilai tambah bagi negara dan perusahaan.

"Kami melihat potensi hydrogen plant yang bisa menghasilkan green hydrogen mampu memberikan nilai tambah dan prospek pengembangan bisnis ke depan," ujar Darmawan.

Direktur Utama PLN NP Rully Firmansyah merinci selama ini korporasinya telah menghasilkan grey hydrogen dari hydrogen plant yang telah beroperasi. Namun, dengan adanya penggunaan solar PV dan didukung oleh Renewable Energy Certificate (REC), PLN NP telah memiliki GHP pertama di Indonesia.

Memanfaatkan beberapa electrolyzer dengan konsumsi daya 2.795 Megawatt Hour (MWh) per tahun, PLN NP mampu menghasilkan 100% hidrogen hijau sebesar 51 ton per tahun.

"Melalui pemanfaatan PLTS yang telah terpasang di PLTGU Muara Karang, kami menjadikan hidrogen ini berjenis hijau dan bebas emisi CO2, jadi hidrogen hijau ini murni 100% dari EBT," tegas Rully.

Lewat upaya ini, PLN NP mampu menghasilkan bahan baku alternatif bagi sektor industri yang bergerak ke arah industri hijau. Ke depan, PLN NP juga akan mengembangkan green hydrogen storage yang bisa menyimpan hasil hidrogen hijau ini sehingga bisa dimanfaatkan di kemudian hari. (adv)



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Terlihat informasi layanan E-resep pada layar apotek rawat jalan RSUD.

Pasien Tak Perlu Lagi Antre Obat, RSUD Taman Husada Terapkan Layanan E-Resep

BONTANG – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Kota Bontang menerapkan E-Resep pada pelayanan farmasi Apotek Rawat Jalan.

Kepala unit depo farmasi rawat jalan RSUD Bontang, Altarina Asis, menjelaskan mekanisme pelayanan apotek rawat jalan di RSUD yakni dengan menggunakan resep dari dokter sesuai dengan pelayanan kesehatan namun dokter meresepkan dengan E-Resep.

“Untuk pelayanan resep harus mendapatkan resep dari dokter. Untuk pelayanan resep di farmasi apotek rawat jalan RSUD sudah menggunakan E-Resep (e-prescribing). Kemudian layanan kami sudah elektronik, tinggal melihat nama di layar,” kata Altarina Asis kepada Me-

diakaltim.com saat ditemui, Senin (9/10/2023).

Selanjutnya, Ia mengatakan kemudahan ini diberikan agar menghindari antrean bagi pasien agar tidak mengantre lama. “Dokter yang memeriksa di poli. Kemudian dokter menuliskan resep yang dikirimkan langsung ke apotek. Kemudian pasien tinggal melihat nama di layar. Akan ada informasi ‘menunggu’, ‘validasi farmasi’ ‘sedang diproses’ kemudian ‘selesai’. Itu proses E-Resep di farmasi,” jelas Altarina.

Ia menambahkan setiap harinya, farmasi apotek rawat jalan RSUD bisa melayani resep sebanyak 300-350 resep sesuai dengan hari kerja. “Apotek tetap melayani setiap hari sesuai dengan jadwal jam kerja,” katanya.

Selain menggunakan E-Resep

di farmasi apotek RSUD Bontang akan memudahkan pasien dengan tidak mengantre untuk menyerahkan resep dari pasien.

“Itu, pasien tidak harus mengantre menyerahkan resep. Sekarang notifikasi sudah akan terkirim ke nomor ponsel pasien baik melalui pesan singkat. Jadi pasien tidak harus menunggu antre. Status resep bisa diketahui,” ungkapnya.

Untuk penyelesaian resep obat sendiri dilakukan apotek dengan waktu lebih kurang 30 menit untuk obat non racikan dan untuk obat racikan selama 60 menit. (adv)

Pewarta: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari

Ruang VVIP Wijaya Kusuma RSUD Taman Husada Mulai Bersolek

BONTANG – RSUD Taman Husada Kota Bontang telah berbenah dengan memiliki ruang VVIP Wijaya Kusuma. RSUD telah melakukan perbaikan dengan menyediakan 6 ruangan VVIP di ruang Wijaya Kusuma.

Humas RSUD Taman Husada Kota Bontang, dr Siti Aisyatur Ridha menjelaskan ruang Seruni memiliki ruang kelas I dan VIP serta ruang Wijaya Kusuma diperuntukkan kelas VVIP.

“Di Seruni ada unit Wijaya Kusuma untuk VVIP. RSUD saat ini telah berbenah dengan memiliki ruangan Wijaya Kusuma 1-6 yang diperuntukkan bagi layanan jaminan kesehatan umum atau perusahaan. Kalau plafon kesehatannya memenuhi maka kami akan fasilitasi,” kata dr Ridha kepada Mediakaltim.com.

Dr Ridha menambahkan saat ini tampilan Wijaya Kusuma telah dipercantik dan diperbaiki dengan tetap melengkapi beberapa fasilitas ruangan. “Peminatnya juga banyak, dengan fasilitas VVIP,” katanya.

Ia menambahkan bahwa masih ada beberapa ruangan yang diperbaiki dan diubah untuk kenyamanan pasien. “Ada dua ruangan masih perbaikan. Saat ini 6 ruangan telah digunakan dan dibuat nyaman. VVIP juga melayani ketika ada pasien yang



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Ruang VVIP Wijaya Kusuma di RSUD Taman Husada Kota Bontang.

ingin naik kelas dan pasien umum,” ungkapnya.

Sementara, ruang Seruni RSUD memiliki beberapa ruang seperti kelas 1 dan ruang VVIP. “Kami tetap fasilitasi penunggu pasien juga ketika menjaga pasien di rumah sakit,

harapan kami pasien menjadi nyaman dengan adanya pembenahan ruangan-ruangan ini,” tandasnya. (adv)

Pewarta: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari








SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN

* TOYOTA MOTOR OIL

Khusus Taxi Online & Travel



GUARANTEE

PALING HEMAT

GUARANTEE




Informasi - Call/WA :

Adi S : 0822-5435-0088

Urusan Toyota lebih mudah!



Bontang





BOOKING THS SAJA

BTS

di Digiroom







THS Sama Lengkapnya Dengan Bengkel

DAPATKAN GRATIS 1^l OLI TMO SYNTETIC SETIAP SERVICE BERKALA*



Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan
Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

Kode Promo
BTSOLI

*Syarat dan ketentuan berlaku

Informasi - Call/WA :

Adi S : 0822-5435-0088



Bontang

Urusan Toyota lebih mudah!



Kedua orangtua bayi KC menunjukkan rekaman video cctv kekerasan ART terhadap anaknya.

Sempat Lari ke Mamuju, ART Aniaya Balita 9 Bulan di Balikpapan Ditangkap Polisi

BALIKPAPAN - Aksi kekerasan terhadap anak di bawah umur terjadi di Kota Balikpapan. Kali ini melibatkan seorang asisten rumah tangga (ART) serta anak yang berusia 9 bulan. Orang tua anak berinisial KC, Nanda Adi Surya dan Putri Rachmadani mengatakan, kejadian tersebut bermula saat Putri (Ibu) memeriksa rekaman CCTV di kamar sang anak. Dalam video terlihat ART yang berinisial RI (37) telah menendang, menarik, dan membedong anak majikannya dengan kencang.

"Anak saya memang kesehariannya selalu sama istri. Kebetulan kemarin, utinya sedang nggak enak badan dan juga kebetulan yang asuh anak saya pertama itu pernah sama ART ini," ujar Nanda Adi Surya, Senin (9/10/2023).

Nanda menjelaskan, peristiwa kekerasan terhadap anaknya itu terjadi pada Senin, 25 September 2023. Di mana saat itu, anaknya ditiptkan kepada RI di rumah mereka di Balikpapan.

"Saat itu, istri saya ada kegiatan di

luar rumah. Jadi, anak kami ditiptkan kepada ART. Ternyata, RI itu melakukan kekerasan kepada anak kami," tambahnya.

Hal itu diketahui pada malam harinya, Nanda dan istrinya melihat rekaman kamera pengawas. Pasalnya mereka sedikit heran lantaran KC tertidur lebih cepat. Dari salinan rekaman video CCTV, mereka terkejut melihat ART tersebut menganiaya anak mereka.

"Ada gerakan-gerakan yang mengarah ke kekerasan seperti menendang, mengaitkan kaki ke kepala wajah, dan menarik pakaian," tegas Nanda.

Setelah mengetahui kejadian tersebut, Nanda Adi dan istrinya langsung berkomunikasi dengan ART. Namun, ART mengakui perbuatannya tapi tidak meminta maaf atas kejadian tersebut. "Dia hanya bilang, 'Saya sadar', tapi tidak ada permintaan maaf yang serius," jelasnya.

Pada Rabu, 27 September 2023, Nanda Adi dan istrinya, Putri Rachmadani, melaporkan RI ke Polda

Kalimantan Timur. Namun, RI tidak memenuhi panggilan polisi.

"Dia sudah keluar dari sini (rumah) dan mau pulang ke kampungnya. Tapi dia malah ke Mamuju," ujar Nanda lagi.

Pada Kamis 28 September 2023, Nanda Adi berangkat ke Mamuju, Sulawesi Barat, untuk mencari ART. Membawa bukti-bukti kekerasan yang dilakukan ART terhadap anaknya. Nanda Adi melaporkan ART ke Polres Mamuju pada Jumat (29/9/2023). Pada hari yang sama, ART ditangkap oleh polisi.

"Kami bersyukur bahwa ART akhirnya ditangkap dan dijemput polisi dari Polda Kaltim," tambahnya.

Nanda Adi berharap, pelaku dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Dia juga berharap, kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua orang untuk lebih berhati-hati dalam memilih ART.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Ratusan Ormas terlihat mengikuti sosialisasi UU Ormas.

Ciptakan Kondusivitas Jelang Pemilu, Ratusan Ormas Ikuti Sosialisasi UU Organisasi Kemasyarakatan

BONTANG – Ratusan Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kota Bontang mengikuti sosialisasi yang mengusung tema Peran Ormas Kota Bontang dalam Menjaga Kondusivitas dan Mewujudkan Pemilu Damai di Kota Bontang pada Senin (9/10/2023) bertempat di Auditorium 3 Dimensi.

Sosialisasi kali ini dikhususkan membahas mengenai UU nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Tujuan digelarnya kegiatan ini tentunya untuk menertibkan dan mendata Ormas yang ada di Kota Bontang dan menjaga kondusivitas Kota Bontang.

Kepala Kesbangpol Bontang, Sigit Alfian mengatakan dengan melakukan sosialisasi UU 17/2013 tentang

Ormas untuk kembali memvalidasi data-data Ormas yang ada di Kota Bontang menjelang Pemilu 2024.

“Pertama kita akan mengadakan Pemilu serentak ke depannya. Kemudian melakukan validasi data kepada ormas-ormas di kota Bontang. Sehingga meminta kerja sama Ormas untuk menjaga Kota Bontang dengan berpedoman empat pilar kebangsaan. Ormas sebagai penghubung masyarakat dan pemerintah,” kata Sigit Alfian kepada Mediakaltim.com, Senin (9/10/2023).

Hal lainnya, Sigit menjelaskan data ormas di kota Bontang yang masih tercatat ada sebanyak 109 ormas. Namun ini masih bertambah dengan adanya ormas yang masih belum melaporkan ke Kesbangpol dengan

tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT). “Peran ormas sangat pengaruh dalam Pemilu damai. Kita banyak turun ke ormas-ormas. Tujuannya adalah menuju Pemilu damai 2024,” jelasnya.

Sigit juga menyinggung UU 17 tahun 2013 ini merupakan acuan bagi ormas untuk mendirikan, membentuk dan menjalankan ormas hingga fungsi organisasi masyarakat. “Pesan kami mari kita sama-sama menjaga kondusivitas Kota Bontang dengan menjalankan tugas fungsi ormas dan berkolaborasi dengan tugas masing-masing bersama pemerintah,” terangnya.

Pewarta: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari



Stadion Gentung Temiang jadi kandang Paser United berkompetisi di Liga 3.

Stadion Gentung Temiang Diincar Jadi Homebase Paser United

PASER - Klub sepak bola amatir pendatang baru asal selatan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), yakni Paser United menginginkan Stadion Gentung Temiang sebagai markas kesebelasan, di bawah naungan Askab PSSI Paser.

Ketua Askab PSSI Paser, Syahdan menyebut, pihaknya juga sudah mendapat lampu hijau dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser untuk menggunakan fasilitas olahraga tersebut, untuk mempersiapkan diri pada kompetisi Liga 3 regional Kalimantan Timur (Kaltim).

"Secara resmi yang kita pinjam ke pemerintah daerah Stadion Gentung Temiang," kata Syahdan, Senin (9/10/2023).

Nantinya sebelum digunakan untuk kesebelasan yang dijuluki Laskar Segentar Bumi, lebih dulu dilakukan verifikasi kelayakan oleh Asprov PSSI Kaltim. Tentunya, hal ini bersifat meminjam. Kendati begitu, hal ini menjadi salah satu bentuk kepedulian Pemkab Paser akan sepak bola.

"Kami berharap stadion (Gentung Temiang) ini kedepannya lebih layak lagi. Ya, mudah-mudahan nantinya

dapat digunakan untuk main malam, bukan hanya sore," harap Syahdan.

Sekadar diketahui, Stadion Gentung Temiang yang berlokasi di Jalan Kesuma Bangsa, Kilometer 5, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot ini pembangunannya sejak 2013 lalu, dan rampung pada 2015. Namun pemanfaatannya barulah sekira 1 tahun terakhir ini.

Pasalnya, di Kabupaten Paser selain Stadion Gentung Temiang juga ada Stadion Sadurengas. Nama terakhir ini intens digunakan untuk berbagai gelaran, baik tingkat Kabupaten maupun Provinsi Kaltim.

Stadion Gentung Temiang baru mulai dimanfaatkan satu terakhir ini karena belum adanya penyerahan aset dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-TR) ke Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Paser.

Sehingga disinyalir menjadi kendala untuk dimanfaatkan, terlebih jika menyangkut tanggung jawab pemeliharaan ke depannya. Dikonfirmasi mengenai hal itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disporapar Kabupaten Paser, Arief Rahman mengatakan penyerahan telah dilakukan sekira

September lalu.

"Dalam hal ini secara resmi sudah diserahkan ke Disporapar selaku pengguna barang untuk memanfaatkannya lebih lanjut," ucap Arief, sapaan karibnya.

Alasan memilih Stadion Gentung Temiang untuk kandang Paser United, karena saat ini Stadion Sadurengas di Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot sedang dilakukan perawatan atau pemeliharaan untuk gelaran Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) November mendatang.

Disinggung perihal sewa stadion yang kerap dilakukan klub profesional, Arief menuturkan sejauh ini belum sampai pada pembahasan atau pola tersebut. Katanya, Pemkab Paser masih sebatas meminjamkan kepada Paser United. Namun tak menutup kemungkinan ke depannya diberlakukan harga sewa, tentunya lebih dulu dilakukan kajian.

"Sampai saat ini belum ke arah sana (sistem sewa), silakan dimanfaatkan dulu. Nanti seperti apa, masih kita carikan polanya," tandasnya.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



LOWONGAN JURNALIS

Media online **MEDIA KALTIM GROUP** membutuhkan beberapa tenaga profesional untuk bergabung di tim redaksi **SAMARINDA & PENAJAM PASER UTARA (PPU)** :

JURNALIS

SYARAT:

Maksimal usia 25 tahun, berjiwa tim, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kreatif, dan menyukai tantangan. Fresh graduate boleh melamar, diutamakan kandidat berpengalaman bidang jurnalisme atau media

Deadline Pengirim CV & Lamaran 30 September 2023.

Pastikan mencantumkan posisi yang dilamar pada subjek email atau pesan WA.

Kirimkan ke **redaksi@mediakaltim.com**

atau WA ke **0853-4894-3982 (SAMARINDA)**
0815-4910-5488 (PPU)

radar.

MEDIA

MEDIA KALTIM GROUP





PENTINGNYA TATA USAHA KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN BLUD



Tampilan dari Kanal YouTube (dari kiri) Moderator Ir. H. Salman Lumoindong, MM dari Widyaswara BPSDM Provinsi Kaltim, Narasumber Hospita Gloria Situmorang, S.H.,M.AP, Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Regional Kalimantan, dan Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan BPSDM Kaltim Siti Djaitun S.Sos MSI

BPSDM Kaltim Gelar Sharing Session Terkait Pengelolaan dan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional ASN

SAMARINDA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Sharing Session ke-43 dengan tema "Pengelolaan dan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional" untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Provinsi Kaltim dan Luar Kaltim pada hari Selasa (3/10/2023). Kegiatan yang disiarkan secara live di Channel YouTube BPSDM Kaltim ini dimulai pukul 10.00 Wita hingga 12.00 Wita.

Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi yang diwakilkan Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan BPSDM Kaltim Siti Djaitun ini, dalam catatannya mengatakan BPSDM Kaltim berkomitmen dan berupaya untuk terus mengembangkan kapasitas ilmu pengetahuan ASN.

"Kami tetap optimis untuk terus meningkatkan kapasitas pengetahuan ASN salah satunya dengan menggelar metode sharing session ini," ujarnya.

Dia berharap para peserta khususnya ASN fungsional bisa menyerap ilmu yang disajikan dalam sharing session ke-43 ini dengan

sebaik-baiknya, terutama ilmu dalam pengelolaan dan pengembangan karir jabatan fungsional.

"Kami berharap semua peserta terkhusus ASN dengan jabatan fungsional bisa mengambil ilmu pengetahuan ini dengan sebaik-baiknya," harapnya.

Kegiatan Sharing Session ini digelar secara daring menggunakan aplikasi Zoom untuk para peserta dan acara ini juga disiarkan secara langsung dari kanal YouTube BPSDM Kaltim untuk ditonton oleh masyarakat secara umum.

Pada Sharing Session kali ini menampilkan Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Regional Kalimantan Hospita Gloria Situmorang sebagai narasumber dan dimoderatori oleh Widyaswara BPSDM Kaltim Ir. H. Salman Lumoindong, MM.

Acara ini sejak di buka diikuti 301 peserta dan hingga berita ini diterbitkan sudah diputar 300 kali. (adv)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan (SKPK) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur (Kaltim), Siti Djaitun S.Sos MSi.

KARIR ASN JABATAN FUNGSIONAL DITENTUKAN ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT

SAMARINDA - Seorang pejabat fungsional harus memahami peraturan yang menjadi landasan karirnya, karena jabatan fungsional sangat berbeda dengan jabatan administrasi maupun jabatan pimpinan tinggi, terutama dari segi kenaikan pangkatnya.

Hal ini dikatakan Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan (SKPK) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur (Kaltim), Siti Djaitun S.Sos MSi, saat Sharing Session ke-43 dengan tema Pengelolaan dan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional yang digelar oleh BPSDM pada Selasa (3/10/2023) melalui aplikasi Zoom.

Siti menyebutkan, Jabatan Fungsional Merupakan Jabatan Karir Aparatur Sipil Negara yang bertu-

gas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Ketentuan Umum tentang Jabatan Fungsional ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional.

Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Pejabat Fungsional. Angka kredit ini diperoleh dari Predikat Kinerja yang dilaksanakan secara tahunan atau dilakukan secara periodik yang dapat dihitung secara proporsional. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional sebagai

salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.

"Seorang pejabat fungsional naik pangkat dengan menggunakan angka kredit, berbeda dengan jabatan administrasi yang kenaikan pangkatnya reguler (4 tahun sekali)," ujarnya.

Peraturan ini dibuat lebih teknis agar mudah dipahami dan diimplementasikan sehingga dapat memberikan landasan bagi instansi pemerintah dalam melakukan pembinaan Jabatan Fungsional.

"Dengan ditetapkannya peraturan ini, Jabatan Fungsional dapat bekerja secara terorganisir dan kolaboratif dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi," tutupnya. **(ADV/Han/BPSDM)**

Pewarta: Hanafi

Editor: Agus Susanto



Kepala BKPSDM Kota Bontang Sudi Priyanto, Sekretaris Daerah Kota Bontang, Hj. Aji Erlynawati, MT dan Kepala Bidang PKMF BPSDM Kaltim Rina Kusharyanti, S.STP, MM. Sesi Foto bersama peserta.

160 PPPK Ikuti Orientasi BPSDM Kaltim

SAMARINDA – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang telah berhasil menggelar Orientasi 160 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

"Hari ini (kemarin, red) telah dilaksanakan penutupan Orientasi PPPK dari 4 angkatan, terdiri dari 160 PPPK dari pemerintah kota Bontang, kegiatan ini hasil dari kerjasama antara BPSDM Kaltim dan BKPSDM Kota Bontang," ujar Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF) BPSDM Kaltim, Rina Kusharyanti.

160 orang tersebut terbagi dari 4 angkatan yakni angkatan 68, 69, 70 dan 71. Setiap angkatan terdiri dari 40 orang PPPK, semua mengikuti orientasi pada 2 - 5 Oktober 2023 di Kantor BPSDM secara tatap muka atau

klasikal dan para peserta menginap selama 3 hari di Asrama yang ada di kompleks perkantoran BPSDM Kaltim, Jalan HM Rifadin Samarinda Seberang.

Rina berharap semua ilmu yang telah didapat pada orientasi PPPK kali ini mampu diterapkan secara baik oleh 160 PPPK angkatan 68, 69, 70 dan 71.

"Semoga para peserta bisa memahami tugas dan peran serta fungsi dari PPPK itu sendiri," pungkasnya.

Acara yang sebelumnya dibuka Gubernur Kaltim Isran Noor Jumat (29/9/2023) lalu di Hotel Mercure Samarinda, secara resmi ditutup Sekretaris Daerah Kota Bontang, Hj. Aji Erlynawati, MT, di Aula Utama Kantor BPSDM Kaltim Jalan HM Rifadin Samarinda Seberang pada Kamis (5/20/2023).

Dalam acara penutupan hadir pula Kepala BKPSDM Kota Bontang Sudi Priyanto. **(ADV)**

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



(dari kiri) Kepala BKPSDM Kota Bontang Sudi Priyanto, Sekretaris Daerah Kota Bontang, Hj. Aji Erlynawati, MT dan Kepala Bidang PKMF BPSDM Kaltim Rina Kusharyanti, S.STP, MM.

BPSDM KALTIM DAN BKPSDM KOTA BONTANG SUKSES GELAR ORIENTASI PPPK UNTUK 4 ANGKATAN

SAMARINDA – Demi menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) gelar Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang, angkatan 68, 69, 70, dan 71.

Acara yang sebelumnya dibuka Gubernur Kaltim Isran Noor Jumat (29/9/2023) lalu, Kamis (5/20/2023) secara resmi ditutup Sekretaris Daerah Kota Bontang, Hj. Aji Erlynawati, MT, di Aula Utama Kantor BPSDM Kaltim Jalan HM Rifadin, Samarinda Seberang.

Turut hadir pada agenda penutupan, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF) BPSDM Kaltim, Rina Kusharyanti mewakili Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, Kepala BKPSDM

Kota Bontang Sudi Priyanto.

Kepala Bidang PKMF BPSDM Kaltim, Rina Kusharyanti, menyebutkan pelaksanaan Orientasi PPPK ini hasil kerja sama antara BPSDM Kaltim dan BKPSDM Kota Bontang.

"Hari ini, telah dilaksanakan penutupan Orientasi PPPK dari 4 angkatan, dari pemerintah kota Bontang, kegiatan ini hasil dari kerjasama kami dengan BKPSDM Kota Bontang," ujarnya.

Dengan ditutupnya acara ini Rina berharap semoga peserta Orientas PPPK Kota Bontang ini memahami peran tugas dan fungsi sebagai ASN PPPK.

"Semoga dapat lebih memahami peran dan fungsi ditempat kerja dapat lebih memahami SOPK dapat lebih memahami tugas PPPK yang merupakan ASN Pemkot Bontang," tutupnya. **(ADV)**

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Kepala BPSDM Kaltim Dra Nina Dewi MAP

Ikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Kepala BPSDM Kaltim Masuk 10 Besar dengan Nilai Sangat Memuaskan

SAMARINDA - Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) Samarinda, menggelar Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II Angkatan 12 tahun 2023 yang digelar, Kamis (5/10/2023) di ruang auditorium Kantor Puslatbang KDOD LAN RI Samarinda.

PKN ke-12 tahun 2023 ini diikuti oleh 60 peserta yang berasal dari lembaga pemerintahan pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota, diantaranya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pemerintahan provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kubar, Kabupaten Kukar,

Kabupaten Kutim, Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kabupaten Mahulu, Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Tana Tidung.

Tampil sebagai perwakilan Pemprov Kaltim, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemprov Kaltim Dra Nina Dewi MAP, disebutkan sebagai salah satu peserta yang masuk dalam 10 besar dengan kualifikasi sangat memuaskan

Pelepasan peserta PKN dilakukan oleh Kepala LAN RI Samarinda, Adi Suryanto, yang turut dihadiri Kepala Puslatbang KDOD LAN RI Samarinda, Muhammad Aswad dan juga oleh Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik secara virtual.

Akmal Malik mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi

kepada para peserta PKN tingkat II angkatan 12 yang telah mengikuti pelatihan selama 4 bulan.

"Selamat kepada seluruh peserta, ini adalah capaian yang luar biasa dan saya sangat bangga melihat semangat dedikasi dan komitmen selama pelatihan ini" ujar Akmal Malik

Pj Gubernur Kaltim ini juga mengatakan PKN merupakan wadah yang sangat penting dalam mengembangkan potensi kepemimpinan para kader terbaik bangsa.

"Dan melalui pelatihan ini juga telah memberikan wawasan pengetahuan yang sangat berharga dalam mempersiapkan diri sebagai pemimpin yang tangguh dan berkualitas," pungkasnya.

(ADV)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari